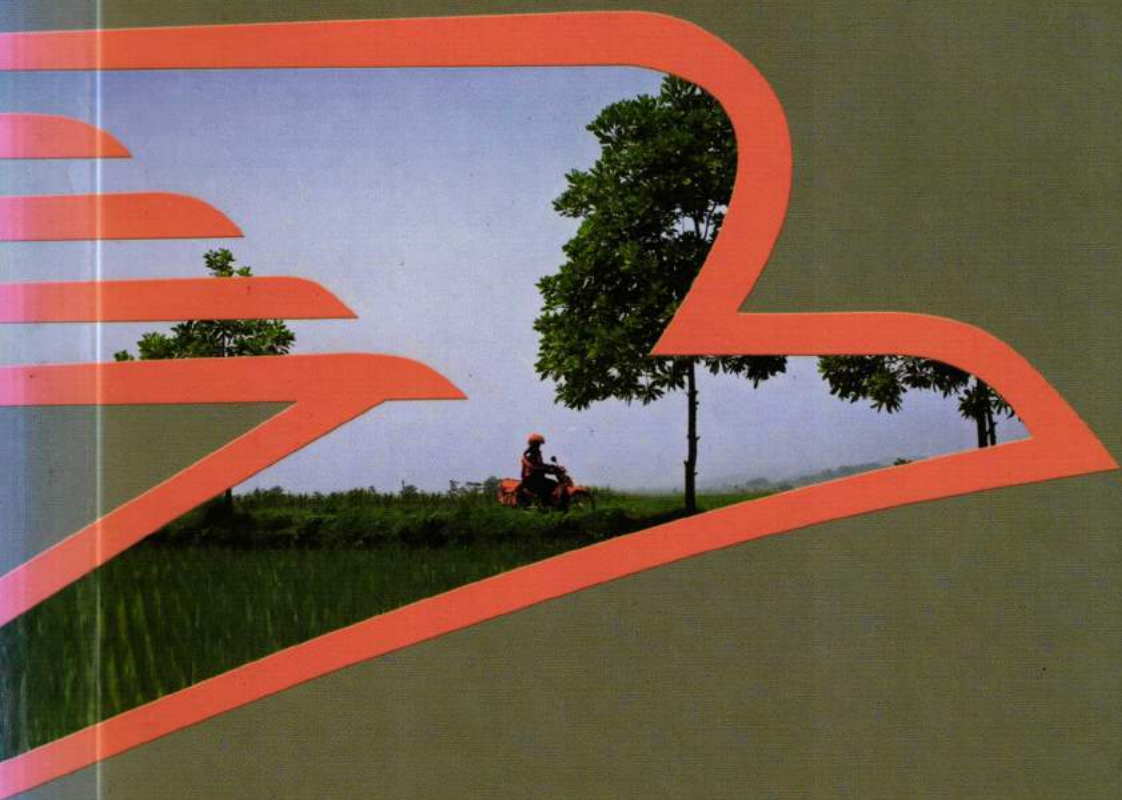


Imam Ahmad • Kholid Novianto
Purnawan Basundoro • dkk •



Melayani Rakyat Menjaga Negara

Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi

PT Pos Indonesia (Persero)

Lspeu
Indonesia



POS INDONESIA

Melayani Rakyat Menjaga Negara
Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi
PT Pos Indonesia (Persero)

Lspeu (*Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha*),
Indonesia berdiri sejak 6 Maret 1997, adalah lembaga
penelitian dan studi etika dan ekonomi-politik dunia usaha dan
lembaga-lembaga ekonomi di Indonesia. Sejak berdiri, lembaga ini
telah melakukan sejumlah riset, seminar, dan publikasi mengenai
etika usaha dan corporate governance, perkembangan dan pengaruh
budaya, politik dan kebijakan ekonomi terhadap kinerja dunia usaha
dan lembaga-lembaga ekonomi lainnya.

**Imam Ahmad, Kholid Novianto,
Purnawan Basundoro, dkk.**

Melayani Rakyat Menjaga Negara
Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi
PT Pos Indonesia (Persero)

Lspeu
Indonesia



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Imam Ahmad

Melayani Rakyat Menjaga Negara : Sejarah Sosial, Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia (Persero) / Imam Ahmad ...[et al.] ; editor, Imam Ahmad. -- Jakarta : Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha (LSPEU) Indonesia, dan PT Pos Indonesia (Persero) 2011.

xx + 512 hlm. : 15.5 x 23 cm.

ISBN 978-979-97611-4-9

1. Pos Indonesia (Persero) -- Sejarah.

1. Judul.

II. Imam Ahmad.

383.495 98

Penulis

Imam Ahmad
Kholid Novianto
Purnawan Basundoro
Bahtiar Effendy
Tawaf T. Irawan
T. Syahrul Ansari
Arbain Nurbawono
Nasikhin Ahsanto

Cetakan pertama Agustus 2011

Diterbitkan oleh *Lspeu* Indonesia (Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia) dan PT Pos Indonesia (Persero).

Menara Gracia Lt. 6, Jl. H. R. Rasuna Said, Kav. C-17 Jakarta 12940
Telp. (021) 5220912-13 Facs. (021) 5220914, e-mail: lspeui@indosat.net.id

© Hak Cipta pada Penerbit

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel dan Gambar.....	iii
Sambutan	v
Prakata	vii
Pendahuluan	ix
BAB 1	Pos Sebagai Oksigen Kehidupan1
Peranan yang Berubah	7
Pelayanan Pos di Indonesia	14
Pos Sebagai Perekat Sosial.....	20
Kartini : Segala Puji Bagi yang Menemukannya	38
BAB 2	Pelayanan Total dan Kerinduan pada Surat45
Pos dan Masyarakat : Hubungan Kemanusiaan	49
Pengantar Pos : Pengabdian dan Pelayanan Total	56
Kring, kring Pos	76
Filateli dan Epistolari	81
BAB 3	Proklamasi PTT.....93
Bandung Pasca Proklamasi	97
Proklamasi PTT : Mengambil Alih Kantor Pusat.....	112
Gerakan Pengambilalihan Kantor PTT di Kota-kota Lain.....	126
AMPTT : Dari Kancah Perjuangan ke Meja Organisasi	134
Pos dan Perjanjian Renville.....	137
BAB 4	Pos di Medan Perang.....143
Berjuang di Pedalaman: Pendukung Mata Rantai Republik Indonesia ..	155
Kurir Pos	166
BAB 5	Menjaga Negara di Wilayah Konflik181
Irian Barat	185
Timor Timur	200
Aceh.....	218

Tabel	9.3	Perbandingan Daya Serap Paket Perjastip dan Perum Pos 1988 – 1994
Tabel	9.4	Perbandingan Sumberdaya Perjastip dan Perum Pos 1994
Tabel	9.5	Penerapan Mekanisasi dan Otomatisasi (MEKOT) Perum Pos dan Giro Tahun 1993
Tabel	9.6	Perkembangan Keuangan Perum Pos 1989-1995 (Dalam jutaan)
Tabel	9.7	Tingkat Kesehatan Perum Pos 1991 - 1995
Tabel	10.1	Perkembangan Produk PT Pos Indonesia (1995-1999)
Tabel	10.2	Perkembangan Pendapatan dan Beban Usaha PT Pos Indonesia (1995-1999)
Tabel	10.3	Daftar Media Koneksi PT Pos Indonesia
Tabel	10.4	Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba PT Pos Indonesia 1999-2005 (Dalam juta rupiah)
Tabel	10.5	Prognose Peningkatan Pendapatan PT Pos Indonesia Tahun 2006 (Dalam milyar)
Tabel	10.6	Ikhtisar Laba/Rugi PT Pos Indonesia 2005-2008 (Dalam milyar rupiah)
Gambar	8.1	Perkembangan Produk Surat Kilat Khusus 1971 – 1978
Gambar	10.1	Catur Sukses Sapta Pedoman PT Pos Indonesia
Gambar	10.2	Perubahan Organisasi Wilayah PT Pos Indonesia
Gambar	10.3	Peta Shift-Share PT Pos Indonesia
Gambar	10.4	Program Transformasi Bisnis dalam Periode Kedua Kepemimpinan Alinafiah
Gambar	10.5	Sasaran 3 G PT Pos Indonesia

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA PT POS INDONESIA (Persero)

Sejak awal masuk ke dalam lingkungan Pos Indonesia, saya sudah menyadari bahwa perusahaan yang sangat tua dan dikenal luas ini pasti memiliki sejarah panjang dan menarik untuk diketahui masyarakat. Hal ini karena semua orang, terlebih mereka yang termasuk generasi tua, dipastikan pernah berhubungan atau menggunakan jasa perusahaan ini. Tambahan pula, pelayanan pos sesungguhnya merupakan fenomena global sehingga, dalam arti tertentu, masyarakat bahkan tidak dapat mengelak kedatangan pos.

Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat gembira terbitnya buku *Melayani Rakyat, Menjaga Negara: Sejarah Sosial-Politik dan Ekonomi PT Pos Indonesia (Persero)* ini, karena dapat menjadi sarana penerangan bagi semua pihak yang ingin mengetahui sepak terjang serta peranan yang dimainkan oleh Pos Indonesia selama ini. Sebagaimana tercermin dari judulnya, pada dasarnya perusahaan ini memang bertolak dari komitmen untuk melayani masyarakat dan negara, namun demikian, seiring perkembangan zaman, harus berubah menjadi perusahaan yang 'sebenarnya' tanpa mengurangi aspek pelayanannya kepada masyarakat dan negara. Hal ini pula yang sesungguhnya membuat Pos Indonesia berbeda dengan perusahaan ekspedisi lain pada umumnya, yang sepenuhnya dikelola sebagai perusahaan komersial. Dengan kata lain, nuansa sosial-politik dan budaya yang melekat erat pada kinerja Pos Indonesia selama ini hendaknya tidak diabaikan oleh siapa pun, dan hingga derajat tertentu menjadi ciri-ciri serta kebanggaan semua insan pos.

Buku ini melengkapi buku lain tentang sejarah pos yang telah lebih dahulu terbit pada tahun 1980, yakni *Sejarah*

Pos dan Telekomunikasi di Indonesia. Buku yang terdiri dari lima jilid tersebut berbeda dengan buku ini karena menggabungkan baik sejarah pos maupun telekomunikasi secara bersamaan. Perbedaan lainnya adalah dari segi pendekatan penulisan, karena buku yang sedang kita baca ini memberi tempat yang cukup kepada individu masyarakat untuk menceritakan pengalamannya dengan pelayanan pos, di samping cerita para insan pos sendiri yang dengan sepenuh hati dan pengorbanan melayani masyarakat. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menyajikan cerita nyata tentang pelayanan pos, dalam arti sebagaimana dirasakan secara kongkrit oleh penerima dan penyedia layanan. Di samping itu, sejarah pos sebagai sebuah perusahaan yang dengan susah payah harus bertahan menghadapi kesulitan dan kekurangan juga diuraikan dalam buku ini, dari sejak masa awal kemerdekaan hingga memasuki abad ke-21.

Akhirnya, saya berharap agar dengan terbitnya buku ini masyarakat akan mengetahui dengan lebih baik apa makna sesungguhnya dari pelayanan pos secara sosial, politik dan budaya seperti diuraikan di dalamnya. Di sisi lain, buku ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan semangat kepada seluruh insan pos untuk terus berkarya dan mengukir sejarah baru, di zaman yang juga baru dan penuh dengan tantangan.

Bandung, Agustus 2011
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero)

I Ketut Mardjana

PRAKATA

Menulis sebuah buku tentang sejarah pelayanan pos di Indonesia kiranya akan seketika menimbulkan pertanyaan di benak orang mengenai berapa panjang subyek itu akan ditulis. Hal ini dapat dipahami mengingat luas dan banyaknya topik yang dapat dieksplorasi menjadi bagian-bagian yang menarik di dalamnya, yang pada gilirannya akan membawa implikasi pada hasil penulisan yang panjang. Sesungguhnya, sejarah pos memang panjang serta kaya dengan bahan-bahan untuk diolah. Namun demikian, untunglah bahwa sejarah apapun selalu dapat ditulis secara lebih pendek dari yang diinginkan secara ideal, di samping dalam perspektif tertentu sehingga tidak dapat secara semena-mena menambahkan cerita apa saja di dalamnya.

Demikianlah, buku ini ditulis dengan sejumlah keterbatasan yang sebagian memang harus dilakukan karena pemilihan perspektif yang khas, di samping karena kemampuan dan kesempatan para penulisnya dalam mengeksplorasi sumber-sumber yang tersedia secara lebih optimal. Hasilnya adalah sebuah buku yang betapapun masih banyak kekurangannya diharapkan cukup memadai untuk melengkapi buku-buku lain tentang sejarah pos, baik yang sudah maupun yang masih akan ditulis di masa depan. Cukup kiranya untuk dikatakan di sini bahwa masih banyak hal yang dapat ditulis mengenai sejarah pos di Indonesia.

Buku ini merupakan hasil kerja sebuah tim penulis yang terdiri dari Imam Ahmad, Kholid Novianto, Purnawan

Basundoro, Bahtiar Effendy, Tawaf T. Irawan, T. Syahrul Ansari, Arbain Nurbawono serta Nasikhin Ahsanto. Sudah barang tentu tim ini memperoleh berbagai bentuk dukungan dan bantuan dari keluarga besar PT Pos Indonesia (Persero), yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu karena terlalu banyak jumlahnya. Termasuk di antaranya jajaran direksi, pegawai, maupun para pensiunan PT Pos Indonesia, baik di Bandung maupun kota-kota lain di Indonesia, di mana para penulis melakukan wawancara untuk mencari informasi dan bahan-bahan untuk penulisan buku ini. Begitu pula dari warga masyarakat pengguna layanan pos serta sejumlah filatelis di berbagai kota.

Kepada mereka semua para penulis mengucapkan terima kasih yang sangat tulus, karena tanpa bantuan mereka buku ini tidak mungkin dapat ditulis dan diterbitkan.

Jakarta, September 2010

Para penulis

PENDAHULUAN

“Lebih dari sekedar sarana komunikasi, surat-menyurat bahkan sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia.”

Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat di abad ke-21 ini telah memanjakan masyarakat dengan kemudahan berkomunikasi yang tidak terbayangkan bentuknya, katakanlah, tigapuluh tahun yang silam ketika sarana komunikasi elektronik belum mengalami perkembangan secara mengagumkan sebagaimana kita lihat dewasa ini. Sementara komunikasi masih tetap merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan bermasyarakat, persoalan yang kini mengemuka bukanlah antara ada atau tidak adanya komunikasi, melainkan seberapa cepat komunikasi dapat dipertukarkan di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu, juga seberapa canggih sarana dan bentuk komunikasi yang dipilih, yang pada gilirannya sangat berpengaruh pada kemudahannya untuk digunakan dan, hingga tingkat tertentu, dinikmati. Saat ini sarana komunikasi antar manusia sudah dalam bentuk audio-visual yang canggih, cepat dan praktis, sementara tigapuluh tahun yang silam orang masih harus bersusah payah menggunakan sarana yang serba manual, lambat dan tidak praktis.

Masyarakat dewasa ini yang sudah menjadi semakin 'berjiwa elektronik' cenderung untuk melupakan sarana komunikasi yang sangat penting dan tidak tergantikan pada zamannya, yakni pos. Hingga sekitar duapuluh tahun yang silam, sesungguhnya pos masih menjadi sarana komunikasi

dan pertukaran informasi yang sangat dominan di seluruh dunia, ketika manusia masih menggunakan kertas yang ditulisi dengan tinta sebagai wahana komunikasi serta dokumentasi buah pemikiran dan pengetahuannya. Cara berkomunikasi dengan menggunakan kertas sebagai wahana penyampaiannya yang disebut surat-saat ini semakin jarang dimanfaatkan orang, karena sangat lambat dan tidak praktis jika dibandingkan dengan surat elektronik (*e-mail*), pesan pendek (*short message service*, atau SMS), atau berbicara langsung melalui telepon yang kini menjadi semakin mudah. Masyarakat sudah semakin lupa bahwa di masa lalu surat merupakan sarana komunikasi massal yang murah dan handal, yang sangat populer karena dapat menjangkau tempat-tempat yang sangat terpencil dan praktis tidak ada alternatif lainnya. Pendeknya, masyarakat tidak dapat dipisahkan dari surat-menyurat.

Lebih dari sekedar sarana komunikasi, surat-menyurat bahkan sudah menjadi bagian dari kebudayaan manusia. Dengan kata lain, kegiatan surat-menyurat juga sudah menjadi sebetulnya kesenian untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan penulisnya yang paling mendalam, sehingga pada kasus-kasus tertentu surat menjadi dokumen sejarah yang sangat berharga. Pada zamannya dahulu, surat sangat ditunggu kedatangannya, dan menunggu kedatangan surat menjadi saat-saat yang mendebarkan. Tidak sedikit lagu diciptakan dan dinyanyikan mengenai perasaan seseorang setelah membaca surat, yang umumnya bertemakan cinta, namun ini membuktikan bahwa surat sudah menjadi fenomena sosial-budaya yang universal.

Di balik surat-surat yang berseliweran dari dan ke segala penjuru di tanah air, yang jumlahnya puluhan juta

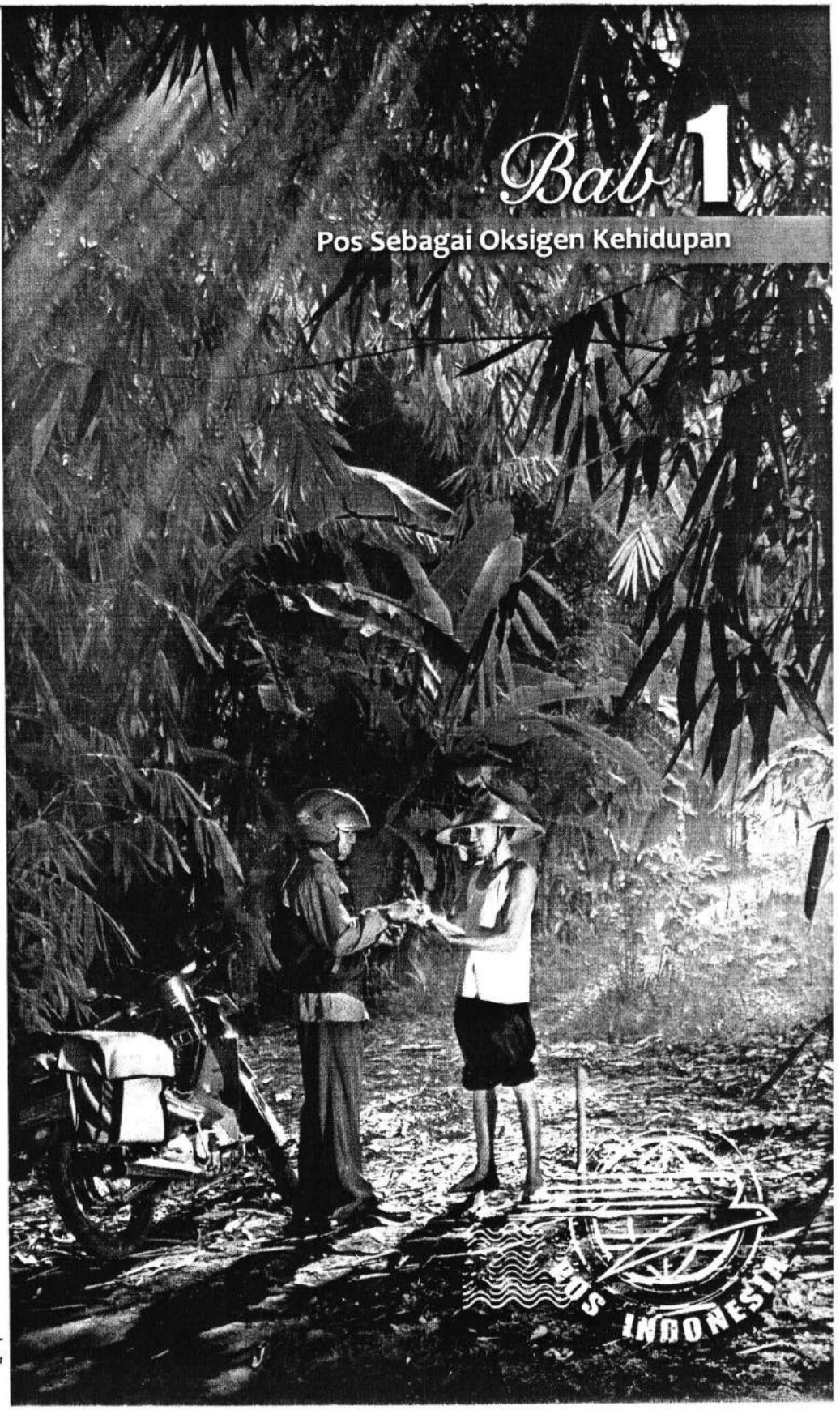
per tahun, adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, mengangkut dan mengantarkannya ke alamat masing-masing. Perusahaan yang semula merupakan salah satu dinas di bawah pemerintahan kolonial Belanda tersebut, sebagaimana diketahui, tidak hanya bertugas untuk mendistribusikan surat, tetapi juga mengelola pengiriman uang masyarakat, paket serta barang-barang cetakan seperti surat kabar, majalah dan buku. Dengan demikian, sesungguhnya PT Pos merupakan sarana diseminasi informasi untuk masyarakat yang sangat penting, yang oleh karena itu dilindungi dan didukung penuh oleh pemerintah, baik di masa kolonial Belanda maupun setelah berdirinya negara Republik Indonesia. Kebijakan seperti ini dianut oleh pemerintahan semua negara di dunia, mengingat arti penting dan strategisnya pelayanan pos tersebut, baik di masa damai maupun perang. Karena itu pula pemerintah kolonial Belanda menyatukan dinas pelayanan pos dengan dua layanan komunikasi lain yang penting waktu itu, yakni telegraf dan telepon, sehingga terbentuklah Dinas Pos, Telegraf dan Telepon (PTT), yang sejak tahun 1923 berpusat di Bandung.¹

Peranan penting dan strategis pelayanan komunikasi untuk masyarakat oleh PTT cikal bakal PT Pos Indonesia boleh jadi dengan mudah dipahami di masa damai, karena masyarakat memang mutlak memerlukan komunikasi. Namun demikian, sesungguhnya PTT telah pula memainkan peranan penting selama masa revolusi fisik kemerdekaan Republik Indonesia, bukan hanya sebagai sebuah lembaga tetapi juga karena keterlibatan para pegawainya dalam peperangan tersebut. Dengan kata lain, sebagai lembaga strategis tidak pelak PTT memiliki kedudukan politik yang

(1)Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia: Jilid I, Masa Pra Republik* (Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980), hlm. 114.

Bab 1

Pos Sebagai Oksigen Kehidupan



Bab 1

Pos Sebagai Oksigen Kehidupan

“Keberadaan pos adalah ibarat aliran oksigen di udara, hanya ketika oksigen itu berhenti mengalirlah orang menyadari betapa pentingnya ia bagi kehidupan”

Membicarakan peranan pos sebagai sarana komunikasi di awal abad ke-21 boleh jadi akan dianggap sebagai berbicara tentang sejarah, atau sesuatu yang akan segera menjadi sejarah. Betapa tidak! Pos dalam peranan klasiknya sebagai sarana pertukaran informasi dalam bentuk pengiriman surat-surat dan dokumen, kini semakin kehilangan gengsi dan kewibawaannya karena tergantikan oleh sarana lain. Kemajuan teknologi informasi telah memberikan kemudahan dan kecepatan yang mencengangkan kepada masyarakat untuk bertukar informasi secara jauh lebih efektif dan efisien. Bahkan, bukan hanya pertukaran berita seperti yang selama ini dilakukan orang melalui kirim-mengirim surat, tetapi juga gambar, suara dan video, yang dapat dilakukan dalam hitungan detik, ke manapun di dunia ini sejauh terdapat sarana untuk itu. Dalam kenyataannya, sarana tersebut - seperangkat komputer yang disambungkan dengan jaringan internet - semakin menyebar ke seluruh pelosok dunia, dengan harga yang semakin murah.

Revolusi komunikasi ini terjadi tanpa dapat dielakkan sebagai dampak dari kemajuan teknologi yang memungkinkan manusia dapat mempertukarkan pesan dan gagasannya dalam bentuk dan kecepatan elektronik. Implikasi

dari kemajuan teknologi ini membuat cara-cara pertukaran informasi berupa kirim-mengirim pesan tertulis dalam bentuk fisik (berupa surat atau dokumen) menjadi ketinggalan zaman. Memang benar, kegiatan kirim-mengirim pesan tertulis ini telah berkembang menjadi urusan yang sangat penting bagi semua bangsa di dunia, karena terkait erat dengan kehidupan manusia modern. Kemudian datang pula waktunya ketika teknologi memberi kemudahan kepada manusia untuk bergerak cepat menggunakan kendaraan bermesin - baik di darat, laut maupun udara - sehingga memungkinkan jasa pelayanan pos berkembang menjadi "sektor usaha" yang terhormat dan melekat pada eksistensi setiap negara di dunia. Lebih penting dari posisinya sebagai sektor usaha, pelayanan pos merupakan bagian dari kewajiban pemerintah di semua negara di dunia untuk menjamin agar setiap orang dapat menjalin komunikasi dengan orang lain di mana pun mereka berada. Hingga tingkat tertentu dapat dikatakan bahwa pelayanan pos merupakan cerminan dari tingkat kemajuan suatu negara karena terkait dengan tingkat kecerdasan rakyatnya serta kemudahan untuk berkomunikasi.

Mengingat peranannya yang sangat penting sebagai sarana komunikasi masyarakat - karena masyarakat mempersyaratkan adanya komunikasi bagi para anggotanya maka tidak mengherankan jika kalangan perposan dunia merasa optimistis bahwa jasa pelayanan ini masih akan berkembang sampai kapan pun. Suasana optimistis tersebut masih sangat terasa paling tidak hingga akhir tahun 1960-an seperti yang terbaca dengan jelas dalam sebuah dokumen bertajuk "*Memorandum on the Role of the Post as a Factor in Economic and Social Development.*" Dokumen yang

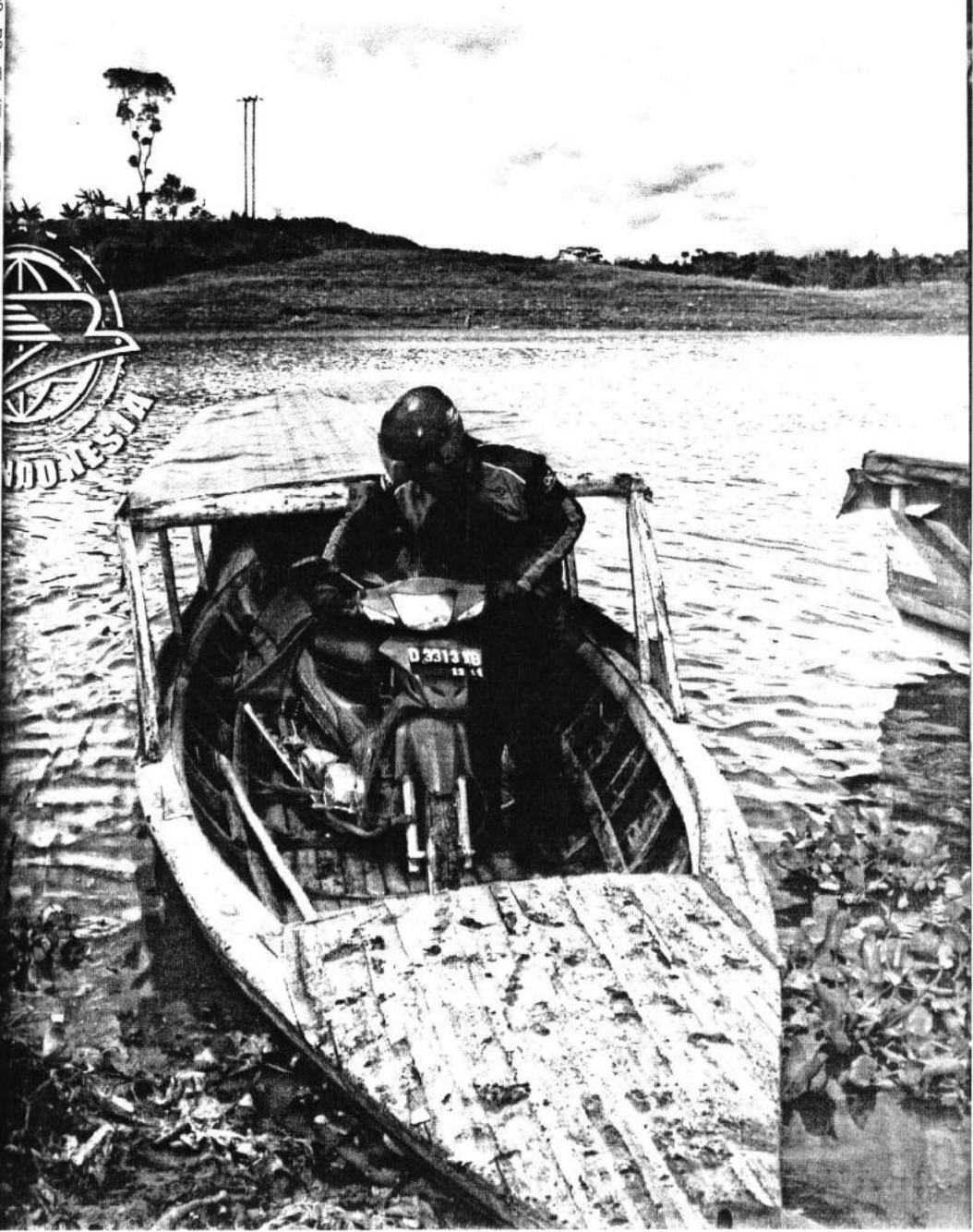
dikeluarkan pada tahun 1970 tersebut adalah merupakan laporan hasil studi yang dilakukan oleh *Consultative Council for Postal Studies* untuk menilai keadaan pelayanan pos di negara-negara berkembang, serta untuk memberikan rekomendasi yang berguna kepada mereka. Dokumen ini menyatakan betapa pelayanan pos telah berperanan sebagai pendorong dan pendukung perkembangan sosial dan ekonomi melalui berbagai jenis layanannya, seperti mengirimi surat, mengantar barang, mendistribusikan surat kabar, serta pengiriman uang. Dimuat pula berbagai contoh aspek positif keberadaan pos di berbagai negara yang menunjukkan bahwa pos -lebih dari apa yang diketahui masyarakat awam- merupakan "instrumen pembangunan ekonomi yang efisien."¹

Di bagian akhir memorandum tersebut disinggung pula mengenai pendapat bahwa telekomunikasi cepat atau lambat akan mengambil alih peranan pos. Terhadap pendapat ini, memorandum tersebut membantah dengan menyitir sebuah hasil penghitungan proyeksi jangka panjang yang dilakukan di Prancis pada tahun 1967 dan 1968, yang menyatakan bahwa penggunaan alat komunikasi elektrik (telepon, teleks, dan sebagainya) memang akan menggantikan surat-menyurat namun dalam jangka panjang menjadi semakin kecil jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan (surat-menyurat) yang menjadi semakin besar. Studi serupa juga dilakukan di Australia, Inggris, Jepang, Belanda, Swiss serta Amerika Serikat walaupun menggunakan metode yang berbeda-beda, yakni ekstrapolasi, analisa matematis dan penggunaan model ekonometris, riset pasar dan sebagainya. Semua studi tersebut sampai pada kesimpulan yang sama.

(1) Lihat "Memorandum on the role of the post as a factor in economic and social development." Naskah ketikan diambil dari majalah *Union Postale* No. 9, tahun 1970, halaman 132A sampai 147A.

Bab 2

Pelayanan Total dan Kerinduan pada Surat



Bab 2

Pelayanan Total dan Kerinduan pada Surat

“Keberadaan Pos Indonesia sudah menyentuh dan menguasai aspek-aspek sosial dan budaya masyarakat seiring dengan sejarah hidupnya yang panjang”

Pada tahun 1994 seorang pemuda dari desa Sukosewu, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, gagal mengikuti tes masuk Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) di Magelang, yang membuatnya sangat kecewa karena cita-citanya untuk menjadi tentara tidak kesampaian. Untunglah, kekecewaan itu segera terobati ketika ia dan kawan-kawannya yang gagal tes tadi ditawari untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Calon Bintara (Secaba) di Bandung, yang dapat mengantarkannya menjadi tentara walaupun melalui jalur yang berbeda. Tawaran tersebut diterimanya dengan suka hati, mengingat keinginannya untuk menjadi tentara sudah sangat mendalam. Sekarang ia menunggu surat panggilan dari Bandung yang akan memberitahukan kapan pendidikan itu akan dimulai. Sesungguhnya, pemuda tersebut, yang bernama N, adalah penduduk desa Sukosewu, namun karena suatu alasan ia menggunakan alamat kerabatnya di desa Kotes, yang masih di Kecamatan Gandusari.

Pada suatu hari, datanglah surat panggilan yang ditunggu-tunggu tersebut di Kantor Pos Gandusari. Surat tersebut adalah jenis surat tercatat yang bertanda R, dan karena alamat si penerima berada di luar batas antar pos

sehingga pihak pos tidak berkewajiban untuk mengantarkannya sampai ke alamat maka pihak pos hanya mengirimkan surat panggilan agar si penerima mengambilnya sendiri di kantor pos. Surat panggilan dari kantor pos tersebut diserahkan ke Kantor Kepala Desa Kotes untuk diteruskan kepada N oleh aparat desa bersangkutan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi karena yang bersangkutan tidak tinggal di desa tersebut, maka surat panggilan tersebut tidak kunjung disampaikan. Pihak kantor pos sampai mengirimkan surat panggilan tiga kali, dan baru pada kali itulah N menerima surat panggilan itu dari *kamituwa* (pejabat desa) setempat. Namun, hari itu ternyata adalah hari terakhir N diharapkan berada di Bandung untuk mendaftarkan diri di Secaba. Sudah barang tentu N tidak mungkin untuk pergi ke Bandung pada hari itu juga, dan hal itu berarti bahwa ia gagal lagi untuk memenuhi cita-citanya untuk menjadi tentara.

Rupanya N sangat kecewa karena kehilangan kesempatan baik untuk menjadi tentara. Kekecewaannya tersebut mendorongnya untuk menggugat *kamituwa* dan kepala desa Kotes di Pengadilan dengan meminta ganti rugi sejumlah uang. Alasan gugatannya adalah karena *kamituwa* setempat telah lalai untuk segera menyampaikan surat panggilan tersebut, sehingga N kehilangan kesempatan untuk menjadi tentara sebagaimana yang ia idam-idamkannya. Ganti rugi uang yang dituntutnya adalah sejumlah keseluruhan gaji yang akan diterimanya sebagai tentara dari mulai masuk hingga pensiun. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Blitar dan sempat menyeret

pihak Kantor Pos Blitar untuk hadir sebagai saksi ahli. Namun demikian, kasus ini tidak berakhir sampai selesai karena setelah beberapa kali sidang N kemudian mencabut gugatannya.¹

Sekalipun kantor pos, sebagai penyedia layanan informasi, bukan menjadi pihak yang digugat oleh pelanggannya, namun tidak pelak kasus yang terjadi pada tahun 1994 ini menjadi ilustrasi yang sangat baik tentang betapa pentingnya pelayanan komunikasi yang lancar dan dapat diandalkan. Ini berarti konsumen tidak akan dikecewakan oleh hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi. Pelayanan pos pada waktu itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat, yang menganggap keberadaannya sebagai keniscayaan. Dalam posisi demikian seperti halnya sebuah perjanjian kerja - suatu kegagalan dalam pelayanan dapat dianggap sebagai wan prestasi yang dapat diperkarakan sampai ke pengadilan. Kasus seperti itu barang tentu tidak banyak terjadi, namun hal itu mengindikasikan bahwa masyarakat sudah menganggap bahwa pelayanan pos sudah menjadi seperti "oksigen" bagi masyarakat, yang ketidakhadirannya dapat membuat masyarakat sakit.

Perlu kiranya untuk dicatat bahwa pada tahun itu, 1994, Pos Indonesia sudah memiliki 6.605 buah kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, dalam berbagai kategori, termasuk kantor pos besar, kantor pos tambahan, kantor pos pembantu dan rumah pos. Dengan jaringan yang menjangkau sampai ke wilayah kecamatan, mereka telah mengantarkan 593.371.000 buah kiriman pos dalam negeri, yang terdiri dari berbagai jenis surat, surat kabar dan barang

(1) Wawancara dengan Suwartono, Blitar, 1 Juni 2009 dan 2 Agustus 2009, dan dengan Iwan Gunawan, Surabaya, 22 April 2009 dan 5 Agustus 2009. Pada tahun 1994 Suwartono adalah pegawai di Kantor Pos Gandusari, Blitar, sedangkan Iwan Gunawan adalah Pegawai Kantor Pos Pembantu di Kantor Pos Blitar. Sekarang Suwartono adalah Kepala Kantor Pos Pembantu Kesamben, Blitar, sedangkan Iwan Gunawan adalah Manajer Humas Wilpos VII di Surabaya. Informasi rinci mengenai kasus ini, seperti kapan persidangan pengadilan dilakukan, berapa jumlah tuntutan ganti rugi serta mengapa gugatan itu dicabut, sudah tidak diingat lagi baik oleh Suwartono maupun Iwan Gunawan. Menurut Suwartono pada tahun berikutnya N berhasil masuk dan mengikuti pendidikan di Secaba dan kini berdinis sebagai tentara.

Bab 3

Proklamasi PTT

INDONESIA
1945

Proklamasi PTT

1. Tujuan PTT

2. Maksud PTT

3. Ruang Lingkup PTT

4. Dasar Hukum PTT

5. Pelaksanaan PTT

6. Penutup



Bab 3

Proklamasi PTT

“Mas Soeharto dan R. Djar memiliki makna simbolik yang amat besar sebagai representasi kekuatan insan PTT di seluruh Indonesia dalam proses "Indonesianisasi" infrastruktur komunikasi dari tangan penjajah ke bangsa Indonesia.”

Revolusi kemerdekaan berakar dari sebuah kalimat sakti yang tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Kalimat sakti tersebut adalah "pemindahan kekuasaan secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Inti dari proklamasi selain pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, adalah bagaimana kekuasaan politik yang semula dikendalikan oleh bangsa asing kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia dan dikendalikan oleh rakyat Indonesia sendiri.

Proses pemindahan kekuasaan itulah yang kemudian harus ditempuh melalui sebuah jalan yang amat panjang dan berliku-liku. Ketika proses tersebut baru saja akan dimulai, sebuah rintangan yang amat berat telah menghadang. Belanda yang telah bercokol begitu lama di bumi Indonesia tentu saja tidak rela jika sebuah wilayah maha kaya yang telah berfungsi menjadi sebuah "gabus tempat mengapung" bangsa yang tidak punya sumberdaya yang memadai tersebut lepas begitu saja ketika Bala Tentara Jepang menyerah. Mereka tidak rela, dan ketidakrelaan tersebut telah membawa mereka pulang kembali ke Indonesia beberapa saat setelah Jepang menyerah dengan

menumpang pasukan Sekutu yang memiliki legitimasi untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan alasan membereskan para tawanan Jepang.

Masuknya pasukan Belanda tersebut telah memancing reaksi yang amat keras dari rakyat Indonesia yang merasa bahwa bangsanya telah merdeka dan sedang melakukan proses pemindahan kekuasaan secara seksama. Maka, tidak ada cara lain, segenap elemen bangsa bahu-membahu mempertahankan tanah air yang telah menjadi haknya, karena proklamasi telah dikumandangkan. Tidak ada jalan lain kecuali mengangkat senjata, mempertahankan kemerdekaan. Maka meletuslah revolusi kemerdekaan, revolusi untuk mempertahankan martabat bangsa yang akan dikangkangi kembali oleh penjajah.

Jika segenap elemen bangsa serentak bergerak bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan, bagaimana insan Pos terlibat dalam revolusi besar tersebut? Pos, saat itu lazim disebut Djawatan Pos, Telegraf, Telepon (Djawatan PTT) adalah institusi sipil yang bertugas mendiseminasi informasi dari dan ke semua elemen masyarakat. Maka lembaga ini sebenarnya tidak didisain untuk terlibat dalam sebuah perang. Namun Djawatan PTT memperoleh legitimasi untuk terlibat dalam perang manakala perang tersebut merupakan bagian dari sebuah revolusi untuk melepaskan diri dari cengkeraman bangsa asing. Revolusi harus didukung oleh semua elemen bangsa agar upaya mempertahankan kemerdekaan memperoleh energi yang maksimal. Maka, Djawatan PTT pun memiliki keabsahan untuk terjun dalam medan pertempuran karena bangsa Indonesia sedang dalam kancah revolusi.

Sejak hari-hari pertama revolusi dalam tahun 1945 sudah terlihat adanya dua persepsi mengenai bagaimana suatu revolusi akan digerakkan serta dikendalikan. Persepsi pertama berpendirian bahwa walaupun revolusi akan berwujud perubahan cepat dan mendasar dalam berbagai bidang, namun agar tetap bersifat konstruktif revolusi harus tetap dikendalikan oleh akal sehat dan kepala yang dingin. Katakanlah persepsi ini sebagai sikap reformis dan realistik terhadap revolusi tersebut. Para penganut persepsi ini berpendapat bahwa di dalam revolusi juga masih ada tempat bagi hukum, tata tertib, dan diplomasi.

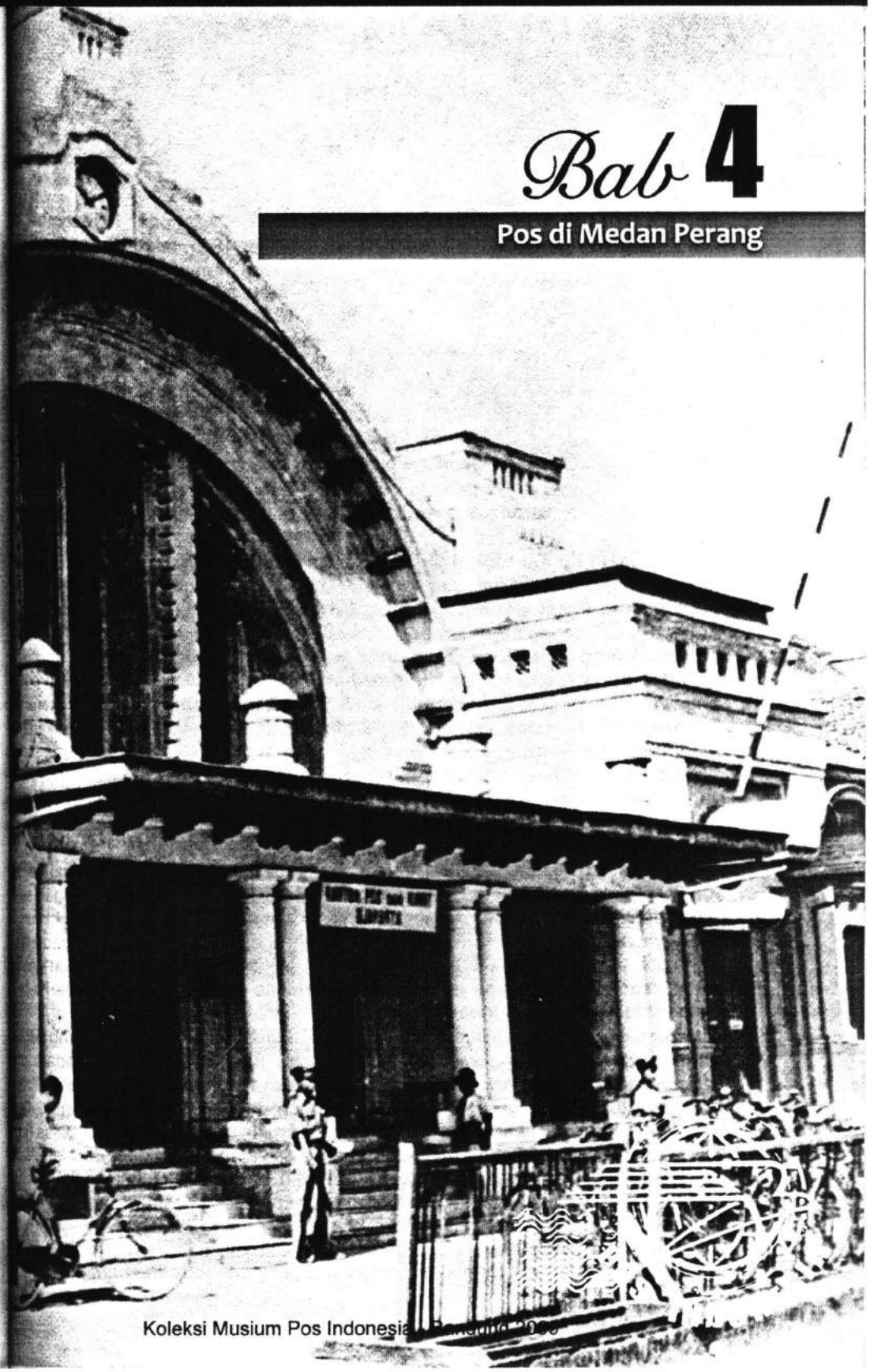
Persepsi kedua berpendirian bahwa bila revolusi sungguh-sungguh akan bersifat *revolusioner*, ia harus merupakan suatu penjungkirbalikkan dan pendobrakan segala nilai lama sampai ke akar-akarnya. Di atas puing-puing tatanan yang lama itulah akan dibangun suatu tatanan yang sama sekali baru. Sikap ini dapat dikatakan sebagai ultra radikal terhadap revolusi. Revolusi dimaknai sebagai gerakan yang keras dan bersenjata.¹

Insan Djawatan PTT mengambil jalan kedua-duanya sebagai langkah untuk memperjuangkan eksistensi lembaga tersebut sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jika jalan damai bisa dilaksanakan maka proses pengambilalihan Kantor Djawatan PTT beserta seluruh propertinya akan dilaksanakan secara damai, tetapi jika kondisi menghendaki agar proses pengambilalihan Kantor Djawatan PTT harus dengan kekerasan maka upaya tersebut adalah ikhtiar terakhir yang memang harus dilakukan. Dua jalan yang berbeda kadang dilakukan pada tempat yang sama tetapi kadang juga dilakukan pada tempat-tempat yang berbeda.

(1) Moerdiono, "Sebuah Refleksi Ideologis tentang Revolusi Nasional Indonesia," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 4.

Bab 4

Pos di Medan Perang



Bab 4

Pos di Medan Perang

“Bahkan ketika zaman penjajahan Jepang fungsi Pos sebagai penyelenggara tabungan Pos mengalahkan peran bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.”

Jika perjuangan pada masa revolusi dimaknai sebagai perjuangan untuk mempertahankan seratus persen kemerdekaan Indonesia maka secara praktis perjuangan tersebut tidak hanya dilakukan melulu dengan mengangkat senjata. Sektor penting yang juga harus dimerdekakan seratus persen adalah stabilitas perekonomian pada masa peralihan tersebut. Khalayak paham betul bahwa selama Indonesia dijajah oleh Belanda hampir seratus persen sistem perekonomian kita sangat tergantung pada penjajah Belanda. Ketika Indonesia berada dalam kontrol pemerintah pendudukan Jepang, kondisi perekonomian bertambah memburuk karena banyak sektor ini yang tidak diurus secara serius. Djawatan PTT, yang di dalamnya termasuk fungsi-fungsi Pos, pada masa penjajahan turut terlibat aktif dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian Indonesia sebagai penyelenggara tabungan masyarakat. Bahkan ketika zaman penjajahan Jepang fungsi Pos sebagai penyelenggara tabungan Pos mengalahkan peran bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.¹ Fungsi-fungsi ini berlanjut sampai Indonesia merdeka. Kisah pendistribusian Oeang Republik Indonesia (ORI) pada awal kemerdekaan menjadi kisah tersendiri yang melibatkan insan Pos pada proses tersebut.²

(1) *Soeara Asia*, 14 Maret 1944.

(2) Salah satu kisah menarik mengenai perjuangan insan Pos dalam mendistribusikan ORI diceritakan oleh Toekoel Hadiwirjanto di Yogyakarta pada tanggal 14 April 2009.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia setelah pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kekacauan ekonomi yang luar biasa serta kerusakan infrastruktur yang terjadi di mana-mana. Kemiskinan dan kelangkaan barang terjadi di hampir setiap wilayah Indonesia. *Hiperinflasi* juga tidak dapat dielakkan. Sumber inflasi adalah beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Peredaran mata uang Jepang di masyarakat diperkirakan sekitar 4 milyar rupiah. Jumlah tersebut kemudian bertambah ketika pasukan Sekutu berhasil menduduki beberapa kota besar di Indonesia dan menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 milyar untuk tujuan operasi dan membiayai para pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintah kolonial Belanda.

Pada awal kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia tidak segera dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku. Hal ini disebabkan negara sendiri belum memiliki mata uang sebagai pengganti. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara makin besar.³ Untuk sementara waktu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Yang dinyatakan berlaku adalah tiga macam mata uang, yaitu mata uang *De Javasche Bank*, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.⁴

Sebagai akibat inflasi yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang, petani

(3) Soemitro

Djojohadikoesoemo, *Beberapa Soal Keoangan*, (Jakarta: TP, 1947), hlm. 27.

(4) Makloemat Presiden RI, No. 1/10, tanggal 3 Oktober 1945.

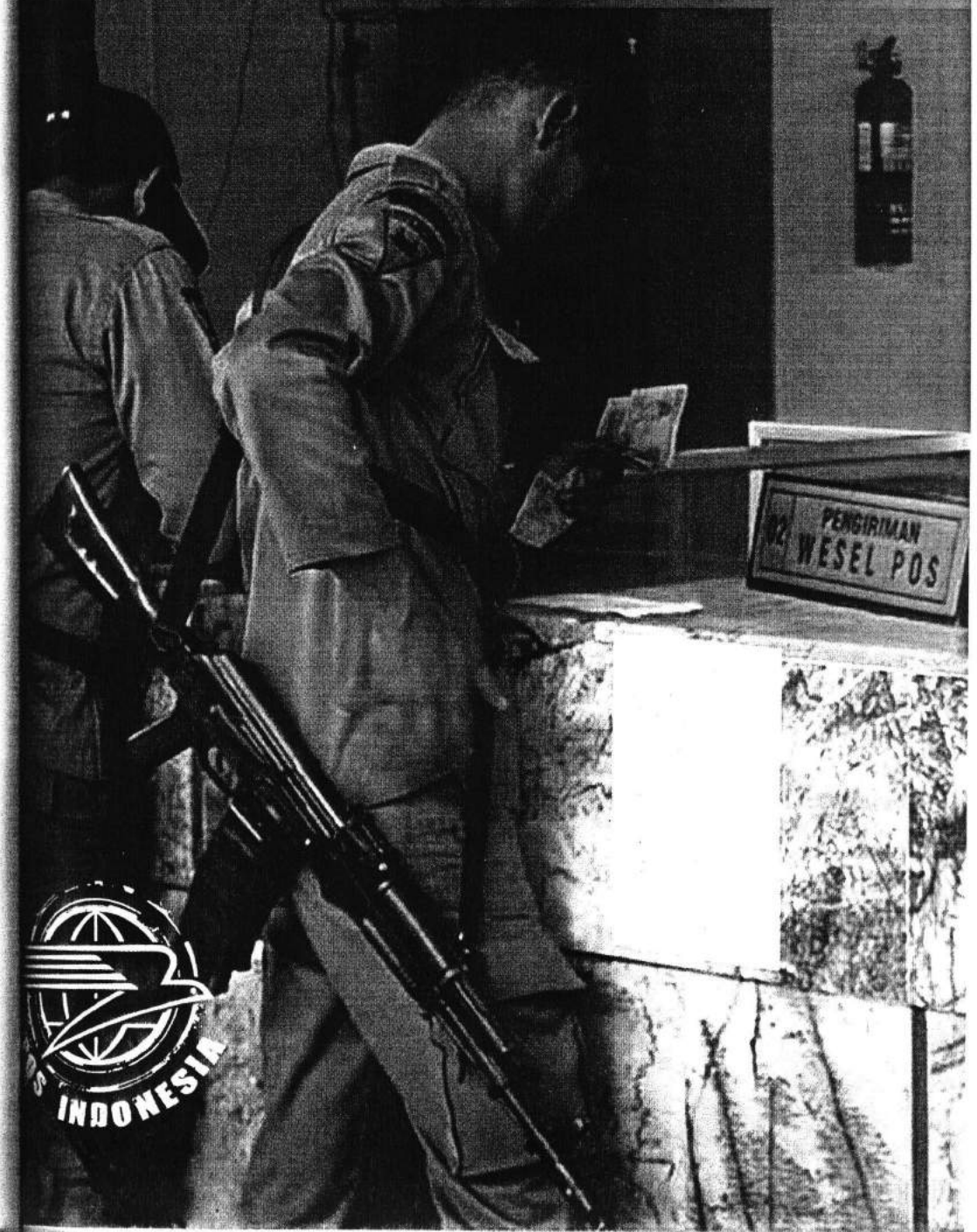
adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Usaha pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter pertama-tama adalah melakukan pinjaman nasional. Dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), Menteri Keuangan Surachman, melaksanakan pinjaman yang direncanakan akan berjumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), yang dibagi dalam dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 40 tahun. Pada Juli 1946 seluruh penduduk Jawa dan Madura diharuskan menyetor uangnya kepada Bank Tabungan Pos dan rumah-rumah pegadaian. Pinjaman Nasional tahap pertama berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁵

Ketika kondisi keuangan Pemerintah Republik Indonesia belum teratasi, ternyata pihak Sekutu di bawah Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford memperlakukan berlakunya uang baru di wilayah yang diduduki Sekutu. Uang baru itu dikenal sebagai uang *Netherland Indies Civil Administration (NICA)*. Uang *NICA* ini dimaksudkan untuk mengganti mata uang Jepang yang nilainya sudah sangat merosot. Maklumat penggantian yang diumumkan tanggal 6 Maret 1946 tersebut memicu protes Perdana Menteri Sutan Sjahrir, karena tindakan Sekutu tersebut telah melanggar persetujuan yang telah disepakati. Dalam persetujuan itu dinyatakan bahwa selama belum ada penyelesaian politik mengenai status Indonesia, tidak akan dikeluarkan mata uang baru untuk menghindari kekacauan ekonomi dan keuangan.

(5) Djojohadikoesoemo, *op.cit.*, hlm. 27.

Bab 5

Menjaga Negara di Wilayah Konflik



Bab 5

Menjaga Negara di Wilayah Konflik

“Adanya pelayanan Pos sesungguhnya juga merupakan simbol kehadiran negara yang secara politis sangat penting”

Pada dasarnya berlaku asumsi bahwa pelayanan pos adalah sesuatu yang netral, dalam arti disediakan untuk masyarakat secara umum: siapa saja, di mana saja dan dalam situasi apa saja, baik damai maupun perang, karena komunikasi antar manusia memang diperlukan dalam segala keadaan. Namun demikian, keterlibatan PTT dalam peperangan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dipastikan tidak dilakukan dengan hati dan pikiran yang netral. Revolusi sosial dan politik yang telah melahirkan sebuah negara sudah tentu menciptakan suasana kehidupan yang jauh lebih rumit dan emosional dibandingkan dengan sekedar kebutuhan untuk berkomunikasi. Dalam peperangan tersebut PTT tidak sekedar menjadi pelayan, namun juga pelaku revolusi, dalam arti bahwa mereka ikut bertanggung-jawab bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain- atas hasil yang dicapai melalui pergolakan selama empat tahun tersebut: yakni tetap tegaknya negara Republik Indonesia.

Perang kemerdekaan merupakan periode yang sangat penting dalam perjalanan hidup Pos Indonesia karena pada saat itu mereka tidak hanya bekerja secara profesional sebagai penyedia sarana komunikasi, tetapi juga sebagai

lembaga perjuangan yang peduli pada nasib politik bangsanya. Sebagai lembaga yang sangat penting dan strategis di masa damai maupun perang, mereka menyadari bahwa keterlibatan mereka dalam revolusi kemerdekaan sangatlah menentukan. Meskipun benar bahwa keberhasilan revolusi kemerdekaan ditentukan oleh banyak faktor dan pihak, namun kiranya jelas bahwa faktor komunikasi merupakan salah satu yang paling penting, persis karena komunikasi dibutuhkan dalam situasi apa pun juga. Keterlibatan Pos Indonesia dalam revolusi kemerdekaan membuktikan bahwa mereka adalah juga sebuah 'lembaga perjuangan' yang diperlukan kehadirannya dalam segala situasi kehidupan masyarakat, termasuk di tengah-tengah konflik sebagaimana terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.

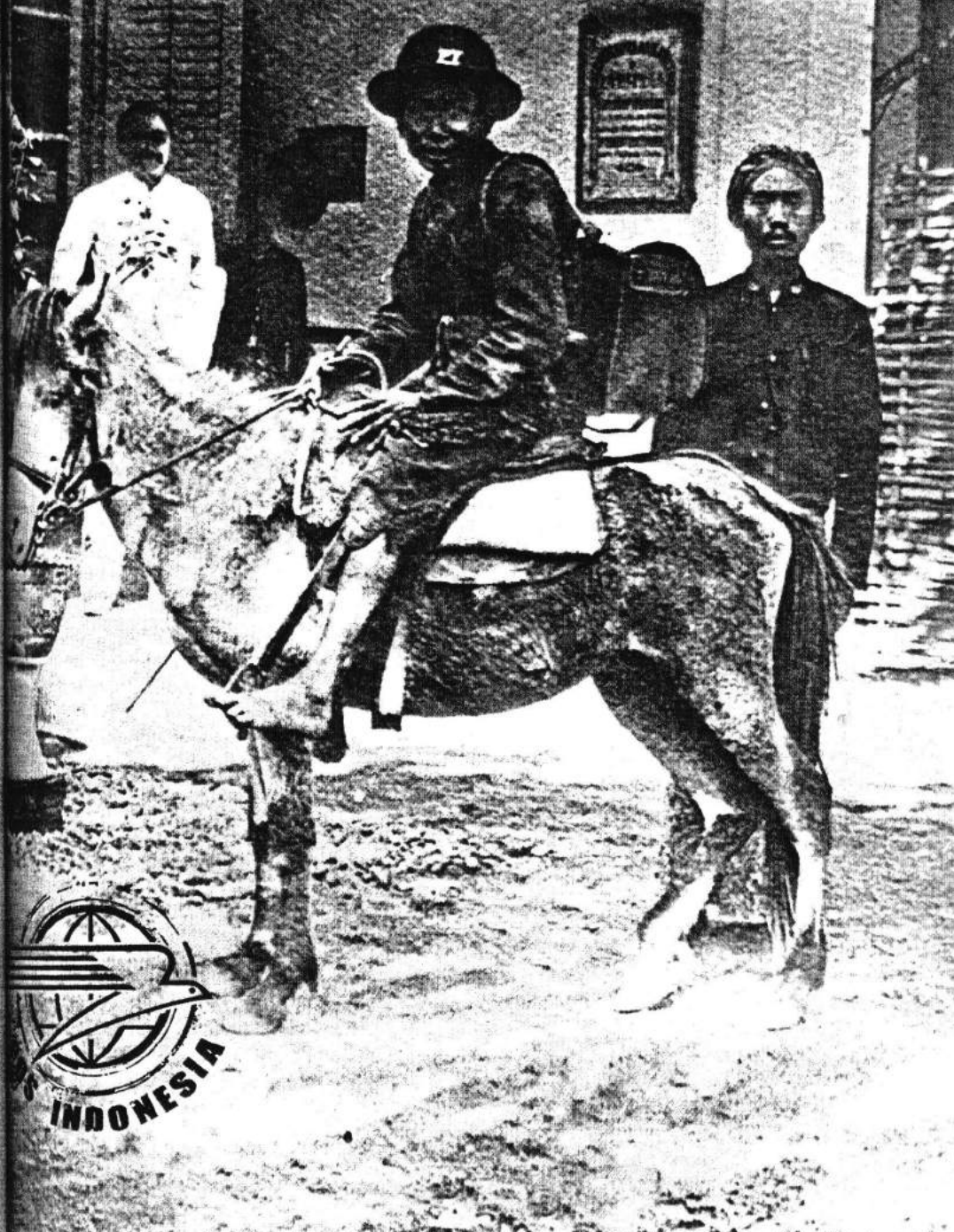
Dalam perjalanan sejarahnya yang sudah lebih dari 60 tahun merdeka, Indonesia mengalami sejumlah konflik domestik bersenjata yang merepotkan pihak pemerintah pusat di Jakarta. Konflik-konflik yang disulut oleh keinginan suatu daerah untuk melepaskan diri dari negara Republik Indonesia ini, akhirnya berkembang menjadi perlawanan bersenjata yang mengakibatkan masyarakat setempat hidup dalam suasana 'setengah perang.' Ini adalah peperangan di mana kawan dan lawan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, yang memaksa siapa pun yang terlibat di sana harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Situasi seperti ini dialami oleh Pos Indonesia yang bertugas sebagai penyelenggara pelayanan Pos untuk masyarakat yang netral, bukan sebagai pelaku peperangan yang memihak seperti di masa revolusi. Pengalaman yang menyulitkan ini terutama terjadi di Aceh

pada tahun 1990-an ketika ketegangan semakin meningkat dan meluas. Dalam situasi yang membingungkan, Pos berada dalam posisi terjepit karena kerap kali dicurigai oleh kedua pihak yang bermusuhan, yakni tentara pemerintah dan pemberontak. Belum lagi pemerasan oleh oknum-oknum yang disebut "Orang Tidak di-Kenal" atau OTK.

Terlepas dari penderitaan yang mereka alami di daerah konflik, kehadiran Pos di sana bukan hanya telah berfungsi sebagai sarana penyambung komunikasi antar anggota masyarakat, tetapi juga secara politis, sebagai penjaga persatuan nasional. Hal ini terasa ketika para pemberontak Aceh, walaupun sering mengganggu dan mengancam, masih tetap mengizinkan Pos untuk beroperasi di sana, sekalipun mereka meminta mobil-mobil Pos ditulisi "Pos Aceh" atau "Pos Untuk Semua," sebagai ganti "Pos Indonesia." Penerimaan mereka terhadap pelayanan Pos di sana kiranya jelas karena peranannya yang tidak tergantikan, tetapi lebih jauh hal itu bermakna bahwa Indonesia masih disatukan oleh pelayanan Pos. Fakta ini membuktikan bahwa adanya pelayanan Pos sesungguhnya juga merupakan simbol kehadiran negara yang secara politis sangat penting. Menerima pelayanan Pos berarti menerima kehadiran negara yang mengelola Pos. Dengan demikian, sesungguhnya Pos dengan caranya sendiri yang khas dan elegan telah berhasil menjaga keutuhan sosial sebuah negara, walaupun secara politik negara sedang bermasalah. Hal ini penting untuk wilayah yang sedang dilanda konflik seperti Aceh dan juga Timor Timur, ketika daerah itu masih bergolak sebelum akhirnya muncul sebagai negara baru, Timor Leste.

Bab 6

Mengelola Pos di Masa Kolonial



Bab 6

Mengelola Pos di Masa Kolonial

“Kantor pos pertama didirikan oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhof pada 26 Agustus 1746. Tujuan awalnya hanya demi menjamin keamanan surat-surat.”

Sejarah pengiriman pesan tertulis atau surat di Indonesia pada dasarnya dapat dilacak hingga masa kerajaan-kerajaan klasik di Nusantara. Tradisi pengiriman pesan tertulis itu tumbuh seiring dengan kebutuhan raja-raja tradisional untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya yang sudah tidak mungkin lagi dilakukan secara tatap muka. Mereka harus mengirim surat kepada *vassal* (kepala perdikan) yang dikuasainya, ataupun juga berkorespondensi dengan penguasa kerajaan-kerajaan lain. Pada masa klasik ini, belum dikenal fungsi pemerintahan dalam bidang pengiriman surat.

Institusi pos seperti yang kita kenal sekarang ini, bukanlah evolusi dari sistem yang berkembang pada masa klasik tersebut. Akar-akar sejarahnya justru berasal dari pemerintahan kolonial Belanda yang pengaruhnya hingga kini masih terasa. Hal itu terlihat dari sistem pengiriman, sistem administrasi hingga sistem pendidikan dinas pelayanan ini. Karena besarnya pengaruh masa kolonial ini, maka setiap upaya untuk memahami karakter perusahaan ini, mau tidak mau, harus menengok masa lalu, saat cetak biru institusi pos diletakkan oleh pemerintahan kolonial.

Dengan alasan ini, bab ini akan melacak lebih jauh dan mendalam, akar-akar sejarah pos di Indonesia, khususnya pada masa kolonial dan masa pendudukan Jepang.



Zaman Belanda

Institusi pengiriman surat, sudah dikenal sejak masa VOC berkuasa di Nusantara. Kita ketahui, VOC adalah sebuah perusahaan dagang Belanda yang berperan sebagai agen semi resmi pemerintah Belanda di Nusantara. Kebutuhan membangun dinas pos tidak terhindarkan mengingat kantor pusat perusahaan dagang berada di negeri Belanda sedangkan operasi perusahaan di kawasan Nusantara. Rentang jarak antara Belanda dengan Batavia sebagai pusat kekuasaan di Nusantara yang sangat jauh menjadikan sarana komunikasi melalui surat sebagai kebutuhan yang tidak terhindarkan. Tidak hanya dalam kerangka hubungan dinas, melainkan juga hubungan personal warga Belanda di tanah air Nusantara dengan kerabatnya di Eropa. Kendatipun warga Belanda yang bermukim di Batavia belum terlalu banyak, namun kebutuhan korespondensi sangat urgen karena sebagian besar warga Belanda yang berada di Batavia selalu memimpikan kembali ke tanah asalnya setelah selesai bertugas.¹ Hubungan batin dengan tanah asal yang kuat ini, di samping dapat menjelaskan minimnya pemukiman Belanda di Jawa, juga dapat menjelaskan tingginya kebutuhan komunikasi melalui surat.

Kapal-kapal Belanda yang melayari trayek Belanda-Jawa tentu saja menjadi tumpuan utama pengiriman surat. Saat itu, sebelum dibukanya Terusan Suez, perjalanan kapal dari Belanda menuju Jawa masih membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 9 bulan. Sedangkan perjalanan kapal antar wilayah di Asia Tenggara membutuhkan waktu

(1) Denys Lombard, *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan*, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 67.

sekitar 4 bulan. Itupun tak ada jadwal rutin. Kelancaran perjalanan kapal baru berlangsung sejak 1754. Dan sejak itu, frekuensi pelayaran mulai cukup rutin. Saat itu, frekuensi kapal yang berlabuh di Batavia mulai meningkat, sekitar 250 kapal setiap tahunnya.² Dan pelayaran antara Batavia, Cirebon, Tegal sampai Semarang, sudah dapat ditempuh dalam waktu dua minggu.

Kantor pos pertama baru didirikan oleh Gubernur Jenderal GW Baron van Imhof pada 26 Agustus 1746. Tujuan pendirian kantor ini awalnya hanya demi menjamin keamanan surat-surat yang berasal dari luar Jawa maupun dari negeri Belanda. Keamanan surat menjadi perhatian tersendiri mengingat pengiriman surat saat itu masih sering terganggu oleh perampokan-perampokan atau sebab-sebab lainnya. Dengan alasan inilah kantor pos didirikan. Namun, lambat laun kantor pos menjadi dinas tersendiri. Saat itu, pengurus kantor pos hanya terdiri dari dua orang *postmeester* yang dibantu dua orang staf (*klerk*) dan beberapa pengantar pos. Sistem yang diberlakukan masih menganut prinsip pembayaran dibebankan kepada penerima suratpos.³ Di samping itu, sensor surat masih diberlakukan. Seringkali surat dibuka oleh Komisi Sensor di depan penerima apabila dianggap mencurigakan.

Selang empat tahun kemudian, baru didirikan kantor pos di Semarang. Pendirian kantor pos ini menjadi penting karena menandai mulai intensifnya hubungan pos antara Batavia dengan Semarang. Hubungan pos dengan pusat kerajaan Jawa di Yogyakarta dan Surakarta juga mulai

(2) *Ibid.*

(3) Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980), hlm. 50.

Bab 7

Dari Jawatan ke Perusahaan Negara



Bab 7

Dari Jawatan ke Perusahaan Negara

“Kita seperti berada kini di tempat ini, merupakan pemimpin2 dari Djawatan P.T.T jang rupanya ditakdirkan untuk bersama-sama memimpin Djawatan P.T.T. Kita masing2 mempunyai latar belakang jang berlain-lainan, mempunyai pendidikan dan pengalaman jang berbeda-beda dan mendjalani sedjarah jang beraneka warna pula. Akan tetapi kini kita ditugaskan untuk mengerdjakan usaha bersama. Satu-persatu, sendiri-sendiri, kita tak dapat mengerdjakan tugas tersebut dan harus dilakukan bersama. Apabila di dalam mengerdjakan bersama tugas tersebut kita hanya melihat perbedaan2 jang saja sebut tadi, maka akan sia-sialah usaha kita bersama. (Soekardan, 52) “

Pernyataan Soekardan, Direktur Jenderal Djawatan PTT, pada tahun 1952 ini, tampaknya berusaha melukiskan relung terdalam dari problem negara yang baru saja menikmati kemerdekaan dan kedaulatan. Ada harapan yang sangat meluap untuk segera menikmati buah kemerdekaan. Namun, hancurnya infrastruktur selama perang kemerdekaan serta belum adanya arah kebijakan sosial-politik yang baru pasca penerimaan kedaulatan, menjadikan carut marut kehidupan sosial politik menjadi semakin rumit yang pasti tidak terbayangkan sebelumnya oleh para karyawan yang selama lima tahun harus terlibat dalam deru revolusi. Jurang perbedaan yang sangat dalam antara harapan dan kenyataan, tentu saja mudah menyulut kekecewaan.

Soekardan yang dipercaya menjadi pucuk pimpinan Djawatan, mau tidak mau, harus memelihara harapan kemerdekaan itu, walaupun pada saat yang bersamaan dihadapkan pada beragam problem teknis baik akibat perang



MR. R. SOEKARDAN
Kepala Jawatan PTT
September 1950 - April 1957

kemerdekaan, maupun problem lama semenjak zaman kolonial. Tugas ini menjadi maha berat karena Soekardan dihadapkan pada formasi karyawan yang beragam. Ada dua jenis perbedaan karyawan yang tidak mudah disatukan. Pertama adalah perbedaan primordial dan kedua adalah perbedaan latar belakang karyawan yang berasal dari PTT RI dan PTT Pra-Federal yang disertai terbelahnya orientasi politik (*co dan non-co*) perbedaan sistem penggajian, dan sebagainya. Soekardan mungkin sangat sadar akan perlunya semangat baru yang mampu melumerkan berbagai perbedaan primordial dan perbedaan latar belakang asal-usul karyawan. Sebab, hanya dengan kebersamaan baru itulah, fungsi dan peranan Djawatan PTT dapat dijalankan dengan baik; berbagai problem politik, kelangkaan prasarana dan teknis administratif secara perlahan dapat pula diatasi. Sejumlah tantangan berat yang dihadapi Soekardan diuraikan dengan lebih rinci di bawah ini.

Era Soekardan dan Samdjoen

Dualisme organisasi pos yang muncul pada masa revolusi diakhiri pada 7 Februari 1950, dengan digabungkannya PTT RI dan PTT Pra-Federal. Menandai penggabungan ini, R. Soekardan diangkat sebagai Pejabat Kepala PTT RI yang saat itu merangkap Direktur Perhubungan yang meliputi Djawatan Kereta Api dan PTT. Posisinya sebagai Direktur PTT dikukuhkan pada 7 September 1950.

Soekardan bukanlah orang yang dibesarkan oleh Djawatan PTT. Latar belakang pendidikannya adalah lulusan *Recht Hooge School* atau Fakultas Hukum yang ditamatkan pada tahun 1939. Ia memulai karirnya justru sebagai *advocaat* dan *procureur* pada *Raad van Justitie* di Semarang

(1939-1941), dan kemudian berpindah kerja ke perusahaan kereta api *Nederlands Indische Spoorwege* sebagai *adjunct inspecteur*, lalu naik jabatan menjadi Wakil Kepala Inspeksi Kereta Api Semarang (1941-1946). Sesudah proklamasi, Soekardani bekerja di pemerintahan dengan posisi Sekretaris Jenderal Perhubungan (1946-1949). Sentuhannya dengan PTT terjadi pada masa revolusi, yaitu tatkala diperintahkan Menteri Perhubungan untuk membangun stasiun radio darurat di kaki gunung Lawu, Madiun, Jawa Timur, dalam rangka mengumandangkan pidato presiden dalam rangka perintah penghentian tembakan (gencatan senjata) pada saat terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Tugas ini mendorong Soekardani untuk menggandeng karyawan PTT yang saat itu mempunyai keahlian dalam bidang perakitan radio secara darurat. Setelah itu, pada tahun 1949, Soekardani ditunjuk sebagai Direktur Jenderal PTT RIS (1949). Setahun kemudian diangkat menjadi Direktur Jenderal PTT.¹

Soekardani dibantu oleh R. Djar sebagai kepala bidang Pos, O Hong Djie sebagai kepala bidang Telekomunikasi dan M. Soedibjo sebagai kepala bidang administrasi. Pada masa awal kepengurusannya, Djawatan PTT masih mempekerjakan tenaga ahli berkebangsaan Belanda, yang di antaranya adalah P.J. Leemeijer, sebagai penasehat umum, A.J. Kupfer sebagai penasehat bidang teknik, dan H.F. Fleischer sebagai penasehat bidang administrasi.²

Untuk menandai penggabungan ini, Djawatan PTT kemudian menetapkan daerah inspeksi pos, telegraf dan telepon yang meliputi wilayah seluruh Indonesia, dengan pembagian sebagai berikut:



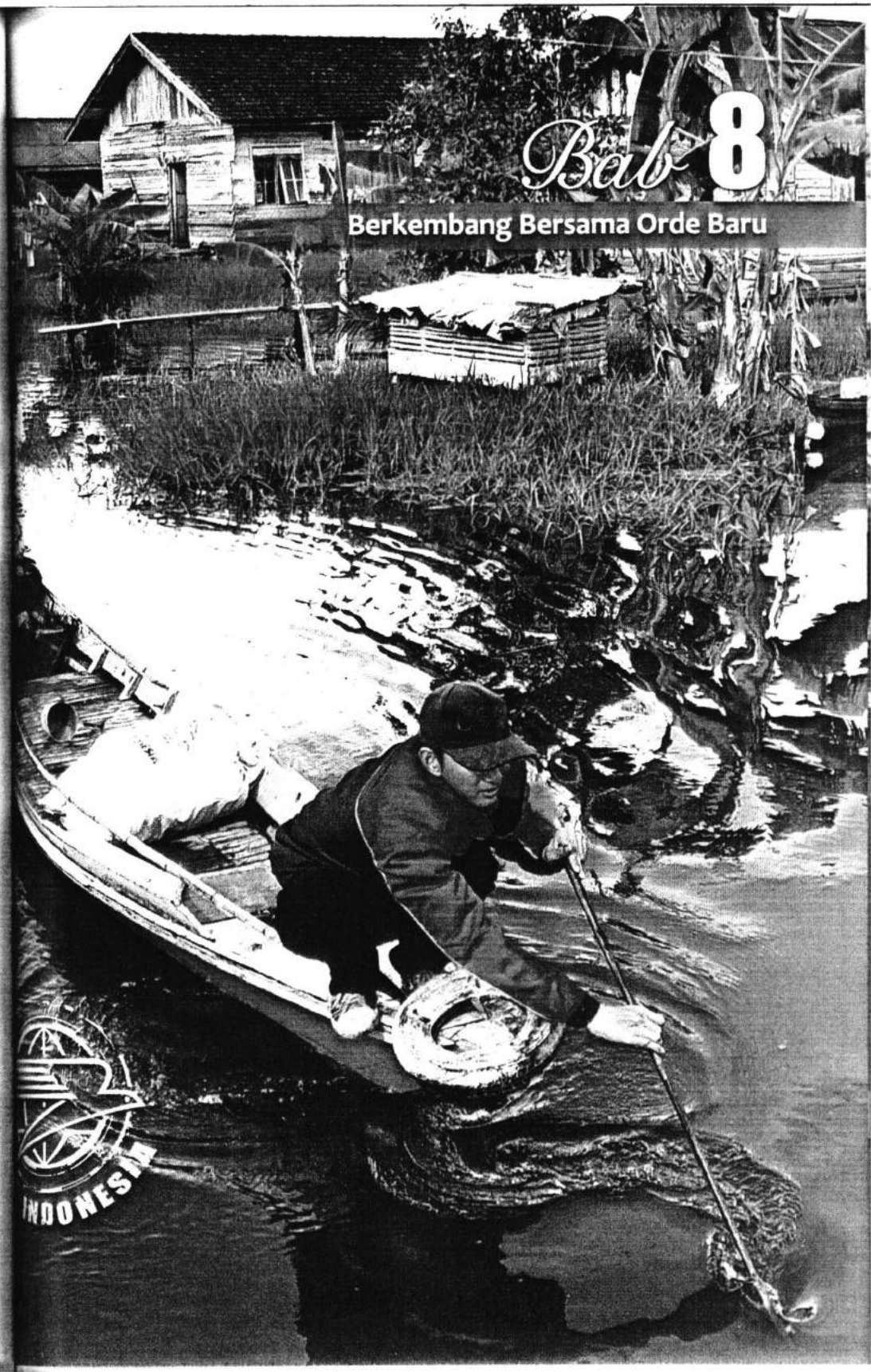
R. DJAR
Wakil Kepala Jawatan P.T.T. R.I
September 1949 - September 1950

(1) Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, *Tokoh-tokoh Sejarah Perjuangan dan Pembangunan Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1985), hlm. 629-630.

(2) Djawatan PTT, "Laporan Tahunan 1950," hlm. 3.

Bab 8

Berkembang Bersama Orde Baru



Bab 8

Berkembang Bersama Orde Baru

“Jangkauan jaringannya mulai dari sudut-sudut kota, pelosok pedesaan, daerah transmigrasi hingga ke daerah terpencil.”

Ketika PN Postel terpisah menjadi dua Perusahaan Negara yang berdiri sendiri pada tahun 1965, yakni PN Telekomunikasi dan PN Pos dan Giro, situasi politik dan ekonomi Indonesia sebenarnya sudah sangat tidak mendukung bagi kelangsungan kedua perusahaan tersebut. Rezim Demokrasi Terpimpin sudah di ambang kebangkrutan, sehingga sangat tidak mungkin memberikan perhatian yang memadai terhadap kelangsungan kedua perusahaan yang baru dipisah itu. Kondisi ekonomi dan bisnis juga sudah sangat buruk, yang tidak memungkinkan kedua perusahaan tersebut beroperasi secara normal, apalagi meraup laba. Dengan situasi seperti itu, sesungguhnya kedua perusahaan harus bekerja keras agar dapat bertahan hidup pada tingkat yang paling mendasar. Inilah yang menjadi tantangan terbesar PN Pos dan Giro. Tantangan ini menjadi penuh risiko karena problem besar itu harus dihadapi justru pada saat memulai lembaran baru sebagai Perusahaan Negara tersendiri.

Akan tetapi, konjungtur politik dan ekonomi rupanya sudah pada titik terendahnya, sehingga hanya ada satu jalan keluar, yakni muncul kembali ke atas dalam bentuk yang baru. Situasi demikian telah mendorong lahirnya Orde Baru yang memberi harapan akan munculnya kebijakan rehabilitasi politik dan ekonomi, yang pada gilirannya

memungkinkan PN Pos dan Giro untuk beroperasi secara normal. Tetapi untuk meraih harapan baru rupanya tidak mudah. Hal ini dikarenakan Orde Baru mempunyai haluan kebijakan politik dan ekonomi yang sama sekali berbeda dengan orde sebelumnya, termasuk dalam menangani perusahaan negara. Paradigma yang berbeda ini menyebabkan agenda pertama PN Pos dan Giro justru menyesuaikan diri dengan garis baru kebijakan Orde Baru. Sebelum dibahas apa pengaruh perubahan lingkungan ekonomi dan politik tersebut bagi PN Pos dan Giro, perlu ditengok kembali perubahan lingkungan politik dan ekonomi yang dilakukan oleh Orde Baru dalam melihat Perusahaan Negara dan penataan ekonomi dan politik secara keseluruhan.



Kebijakan Orde Baru dalam Pengembangan Pos

Latar belakang penting lahirnya politik ekonomi Orde Baru adalah situasi kebangkrutan ekonomi. Pada tahun 1966, inflasi membumbung tinggi hingga 650 persen, uang beredar terus bertambah hingga 40 persen dalam sebulan. Suku bunga melonjak mencapai 30 persen sebulan. Defisit APBN sampai tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan devisa terus minus. Utang luar negeri sebesar 2,4 milyar dolar AS dengan beban pembayaran kembali, yang pada akhir tahun 1967 sebesar 730 juta dolar AS. Di samping itu sebagian besar produksi dan distribusi macet, sehingga rakyat harus antre untuk memperoleh bahan-bahan pokok.

Dengan kondisi seperti itu situasi ekonomi sebenarnya sudah macet. Orde Baru yang mewarisi pemerintahan sebelumnya seperti dalam situasi terjepit, dalam arti tidak banyak pilihan kebijakan yang bisa dikembangkan. Oleh karena itu fokus awal kebijakannya hanyalah stabilisasi ekonomi serta rehabilitasi sarana produksi yang mengalami kehancuran. Fokus ini dirumuskan dalam tertib ekonomi dengan tujuan kebijakan untuk:

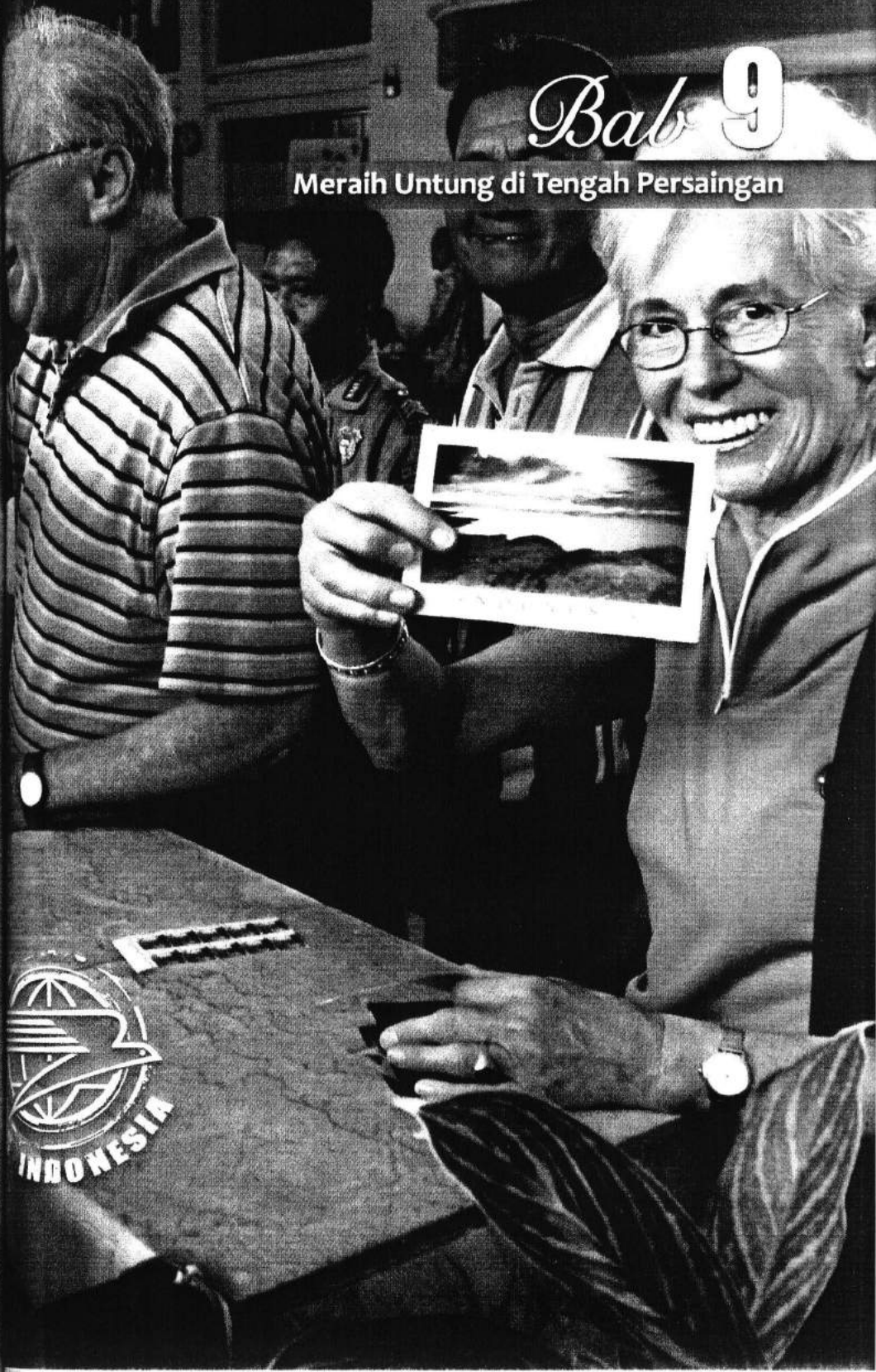
"Mentjiptakan stabilisasi ekonomi-moneter, terutama dengan mengendalikan laju inflasi dan pemulihan produksi khususnya dengan kemampuan menjediakan 9 bahan pokok yang cukup dengan harga yang stabil dan dapat terbeli oleh rakyat."¹

Untuk mencapai tertib ekonomi, Kabinet Ampera menggariskan langkah-langkah yang lebih terperinci, yaitu:

(1) Departemen Penerangan, Pokok-pokok Kebijakan Kabinet Ampera dalam Tahap Konsolidasi, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1967), hlm. 11.

Bab 9

Meraih Untung di Tengah Persaingan



Bab 9

Meraih Untung di Tengah Persaingan

“Strategi disiplin anggaran telah membuahkan keuntungan bagi Perum Pos dan Giro secara terus menerus.”

Saat yang telah lama dinanti-nantikan akhirnya datang juga. Melalui Peraturan Pemerintah No. 9/1978 status (bentuk) badan usaha Pos dan Giro diubah dari perusahaan negara (PN) menjadi perusahaan umum (Perum). Hal ini merupakan pencapaian yang tidak mudah dan sederhana, sebab PN Pos dan Giro harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dengan status PN mereka bisa bangkit dalam meluaskan jaringan layanan dan mencetak laba yang terus meningkat. Lebih dari itu, perubahan status bukanlah sekedar hadiah atas sebuah prestasi, melainkan juga tantangan baru yang harus dihadapi dengan cara-cara yang baru. Mampukah perusahaan negara ini memainkan peranan dengan statusnya yang baru? Sebelum menguraikan lebih lanjut bagaimana Perum Pos dan Giro menjawab tantangan ini, mari kita tengok lebih lanjut terlebih dahulu karakteristik perusahaan umum yang melekat dalam perusahaan milik negara ini.

Perusahaan Umum

Bidang usaha Perum sebetulnya tidak banyak berbeda dengan BUMN dengan status perusahaan jawatan (Perjan). Peraturan Pemerintah (PP) No. 3/1983 tentang "Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero," menyebutkan bahwa "Perjan berusaha di bidang

penyediaan jasa-jasa bagi masyarakat termasuk pelayanan kepada masyarakat." Sedangkan bidang usaha adalah "berusaha di bidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum di samping mendapat keuntungan." Ditilik dari pernyataan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Perum dan Perjan pada dasarnya tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dari sisi bidang kegiatan usahanya

Perbedaan yang cukup penting adalah bahwa Perum dibolehkan memperoleh keuntungan, sedangkan untuk Perjan tidak disebutkan secara eksplisit karena titik beratnya pada pelayanan masyarakat. Unsur ini menjadi penting karena membawa konsekuensi dalam melihat kinerja kedua jenis BUMN ini. Ukuran kinerja Perjan semata-mata ditentukan oleh kemampuannya dalam melakukan pelayanan publik, sedangkan Perum ukuran kinerjanya menjadi ganda. Di samping kemampuan melakukan pelayanan publik juga dilihat kemampuannya dalam menghasilkan laba.

Tugas ganda Perum ditunjang oleh otonomi yang lebih luas dalam pengelolaannya. Dengan kata lain, berbeda dengan Perjan, Perum diberi hak mengelola kekayaan negara secara lebih otonom. Hak Otonomi itu diperoleh dari ketentuan bahwa harta kekayaan yang dikelola Perum dipisahkan dari kekayaan negara yang diatur dalam APBN. Otonomi dan dibolehkannya memperoleh keuntungan, menjadikan Perum tidak bisa semata-mata dilihat sebagai instrumen birokrasi pemerintah, melainkan menjadi sebuah entitas bisnis. Hal ini berarti, kaidah-kaidah dalam dunia bisnis harus juga diterapkan dalam pengelolaan sebuah Perum.

Namun hal ini tidak berarti Perum dapat sepenuhnya bergerak leluasa sebagaimana korporasi pada umumnya.

Modal perusahaan yang tidak terbagi dalam saham, menjadikan Perum tidak mungkin melakukan ekspansi secara leluasa dengan memanfaatkan modal perusahaan. Kebutuhan investasi Perum harus mengandalkan dana internal perusahaan, penyertaan negara melalui APBN, atau pinjaman. Kebutuhan investasi yang berasal dari pinjaman, tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena dibatasi dengan ketentuan pinjaman jangka menengah dan atau jangka panjang, dan harus dengan persetujuan menteri teknis dan menteri keuangan (Pasal 12 PP No. 3/1983).

Dalam konteks Pos dan Giro, perubahan status PN menjadi Perum adalah kemajuan yang sangat penting. Gagasan menjadi Perum bukanlah hal baru. Gagasan ini pernah dilontarkan oleh Soekardan, ketika memimpin Djawatan PTT. Pada tahun 1956 Soekardan telah melontarkan gagasan agar status Pos, Telepon dan Telegraf berubah menjadi *public corporation* atau Perum. Gagasan itu dilontarkan sehubungan dengan sulitnya mengembangkan pengelolaan usaha sepanjang status perusahaan masih berupa jawatan atau PN. Padahal, apa yang dilakukan PTT atau PN Pos dan Giro pada dasarnya adalah pengelolaan usaha dalam bidang pengiriman surat, paket dan pengiriman uang. Keterbatasan untuk mengelola bisnis pos dan giro itu sudah terbukti mengakibatkan defisit yang sangat tinggi pada masa Demokrasi Terpimpin. Situasi memang berubah pada masa Orde Baru. Tekanan pemerintah agar PN tidak menjadi beban APBN, menjadi pemicu untuk mengelola bisnis pos dan giro secara lebih profesional. Hal itu dibuktikan PN Pos dan Giro selama dekade 1970-an. Walaupun statusnya masih PN, Pos dan

Bab 10

Jalan Terjal Menuju Korporasi



Bab 10

Jalan Terjal Menuju Korporasi

*“Perubahan status membawa konsekuensi
perlu nya pembenahan dan reformasi untuk
menciptakan etos kerja baru”*

Prestasi yang ditorehkan Marsoedi memberi optimisme bahwa Perum Pos dan Giro layak untuk masuk ke dalam kancah bisnis yang lebih mendalam. Betapa tidak. Diferensiasi produk sudah dilakukan dalam rangka menyambut peningkatan permintaan jasa pos yang lebih spesifik. Modernisasi peralatan dan pelayanan sudah dilakukan dalam rangka mendorong efisiensi dan percepatan pengiriman surat, wesel dan paket. Sementara itu, kinerja keuangan juga cukup menjanjikan. Belum lagi infrastruktur jaringan kantor pos yang sudah menjangkau seluruh kecamatan di Indonesia. Ini semua menandakan bahwa Perum Pos dan Giro mempunyai kesiapan cukup untuk berperan ganda. Pertama, tetap menjalankan misi pelayanan umum sebagaimana diamanatkan oleh negara. Kedua, Perum Pos dan Giro sudah mempunyai kesiapan untuk masuk dalam bisnis pengiriman secara lebih mendalam. Juga, kesiapan untuk berkompetisi secara adil dengan pelaku usaha pengiriman lainnya baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan agar gerak langkah Perum Pos dan Giro semakin gesit maka yang diperlukan adalah perubahan status hukum menjadi persero.

Menjadi Persero

Tuntutan ini ternyata direspon dengan baik oleh pemerintah. Melalui PP No. 5/1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), pemerintah mengubah status hukum Pos dan Giro dari perum menjadi persero. Dengan pengalihan ini, maka status perum secara resmi dibubarkan dan segala hak dan kewajibannya beralih kepada persero. Selanjutnya, perusahaan persero tersebut diberi nama PT POS INDONESIA sesuai dengan anggaran dasar yang disahkan dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia. Sesuai dengan akta ini, maka modal perseroan ditetapkan sebesar Rp. 750 miliar yang terdiri atas 150.000 lembar saham prioritas dan 600.000 lembar saham biasa, yang masing-masing bernilai nominal Rp. 1 juta per lembar.¹

Perubahan ini membawa konsekuensi yang cukup banyak. *Pertama*, modal negara akan terbagi dalam saham. Modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Perum Pos dan Giro. Selanjutnya, seiring dengan perubahan status menjadi perusahaan perseroan terbatas, modal dapat didayagunakan secara lebih leluasa, misalnya untuk jaminan di bank atau pemerintah dapat menjualnya kepada pihak lain.

Kedua, perubahan status hukum menjadi persero pada dasarnya menghendaki perubahan paradigma. Sesuai dengan Pasal 2, ayat (1) PP No. 3/1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perjan, Perum dan Persero

(1) "Menparpostel Lantik Direksi PT Pos Indonesia" dalam *Merpatipos* No. 7, Tahun XXIX, Juli 1995, hlm. 4.

maka BUMN jenis persero dituntut untuk "memupuk keuntungan dan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi, di luar bidang usaha Perjan dan Perum." Ini berarti misi sebuah persero memang bersifat ganda; mengejar keuntungan dan mendorong pertumbuhan dunia usaha. Misi seperti ini, sesungguhnya tidak dikenal dalam badan hukum berstatus Perum. Karena itu, ketika berubah menjadi Persero, mau tidak mau, paradigma bisnis Pos Indonesia harus lebih menonjol tanpa melupakan misi yang lain.

Ketiga, perilaku persero pada dasarnya harus tunduk pada norma dan kaidah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas). Ini berarti, perubahan status menghendaki adanya perubahan struktur organisasi. Sesuai dengan hukum PT, maka struktur penanggung jawab pengelolaan berada dalam dua lembaga yaitu Dewan Komisaris sebagai pengawas dan Dewan Direksi sebagai pelaksana. Sementara institusi tertinggi dalam pengambilan keputusan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Peraturan Pemerintah mengenai perubahan status Pos dan Giro menjadi persero sebenarnya sudah ditandatangani presiden pada tanggal 27 Februari 1995. Namun akta notaris pendirian PT Pos Indonesia baru ditandatangani pada tanggal 20 Juni 1995. Pada tanggal ini pula pemerintah melantik Dewan Komisaris dan Dewan Direksi yang baru. Dewan Komisaris diketuai oleh Djakarta Purawidjaya dengan anggota Soekarno Abdulrachman, Marsoedi, dan Herman Haeruman. Sedangkan Dewan Direksi diketuai oleh Cahyana Ahmadjayadi.²

Dalam pelantikan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ini, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Joop (2) *ibid.*

Bab 11

Terus Berubah, Terus Melayani

POS INDONESIA



Bab 11

Terus Berubah, Terus Melayani

*“Sebagai tanda kebulatan tekad, ikrar pun diteguhkan
untuk bersatu padu mewujudkan
Pos Indonesia Service Champion”*

Perubahan demi perubahan yang terjadi di dalam tubuh PT Pos Indonesia (Persero) menandakan bahwa perusahaan ini tetap hidup dan, lebih dari itu, responsif terhadap perubahan yang terjadi di luar dirinya. Terlepas dari berbagai keberhasilan dan kegagalan yang dialaminya selama ini ?dalam upaya mendewasakan dirinya sebagai perusahaan yang mandiri dan terhormat- yang jelas semua itu dilakukan karena tanggung jawab segenap insan Pos untuk mempertahankan perusahaan ini di tengah-tengah arus perubahan zaman, di mana pemerintah tidak dapat lagi untuk terus 'menyusainya' namun menghendaknya agar mampu untuk terus melayani masyarakat. Tidak ada yang meragukan bahwa itu semua adalah perjuangan yang sangat berat: mengubah sebuah dinas pelayanan sosial dan politik pemerintah yang hadir di seluruh pelosok nusantara, menjadi sebuah korporasi yang bekerja dengan menerapkan rumus-rumus bisnis modern yang matematis.

Namun demikian, begitulah sejarah 'menghukum' setiap makhluk yang berani menyusup ke dalam ruang dan waktu kehidupan, yakni harus berubah. Termasuk PT Pos Indonesia (persero). Betapa tidak! Jika dahulu perusahaan ini merupakan lembaga negara yang bekerja dengan

mendapatkan banyak bantuan dan perlakuan istimewa dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat, sekarang hampir sepenuhnya dilepaskan sebagaimana layaknya sebuah perusahaan yang harus hidup dari hasil "penjualannya" kepada masyarakat. Perjalanan panjang Pos sejak berbentuk jawatan, kemudian berubah menjadi perusahaan negara (PN), menyusul kemudian sebagai perusahaan umum (Perum), dan akhirnya perseroan terbatas (PT), telah mengubah wajah serta perilaku perusahaan ini secara sangat signifikan, rohani dan jasmani. Apabila dahulu Pos adalah pelayan masyarakat yang sangat terhormat dengan citra birokrasinya yang kuat dan senantiasa dirindukan karena tidak ada pilihan lain- maka sekarang situasinya terbalik karena masyarakatlah yang menentukan apakah mereka akan memilih untuk menggunakan layanan Pos. Sekarang situasi sudah berubah, di mana Pos hanya salah satu dari banyak pilihan yang tersedia bagi masyarakat.

Dahulu, ketika masih berstatus sebagai jawatan, yakni Jawatan Pos, Telegraf dan Telepon (PTT), Pos hidup di bawah perlindungan Undang-Undang No. 4 Tahun 1959 tentang Pos yang memperlakukannya secara istimewa dengan memberikan monopoli serta kemudahan pengangkutan kiriman pos. Setelah berjalan selama dua dasawarsa dan kondisi masyarakat berubah, keluarlah Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos yang memberikan peluang kepada pihak swasta untuk ikut serta bermain di arena perposan, dengan mengurangi hak monopoli Pos. Ketika itu Pos, yang sudah berbentuk Perum, harus berhadapan dengan banyak pesaing swasta yang memanfaatkan berbagai kelemahan Pos. Perubahan zaman yang tidak mungkin dicegah itu dijawab pemerintah, sebagai pemilik Perum Pos, dengan

menjadikannya sebagai perseroan terbatas (PT) agar lebih lincah bermain dan bersaing dengan para pesaing swastanya.

Ketika persaingan di dunia perposan menjadi semakin sengit, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat serta munculnya kreativitas masyarakat harus diakomodasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, maka lahirlah Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos yang bersemangat 'pembebasan pasar' secara maksimal. Dengan adanya undang-undang ini siapa saja diizinkan untuk membuka usaha "penyelenggaraan pos." Undang-Undang yang sangat liberal¹ ini sesungguhnya hanya mensahkan kondisi persaingan perposan yang sengit yang sudah berlangsung lama, di mana perusahaan jasa titipan (Perjastip) swasta, baik dalam negeri maupun asing, sudah tidak dapat dibendung lagi. Dengan undang-undang tersebut dunia usaha perposan menjadi terbuka penuh, tidak ada lagi bagian-bagian tertentu yang disimpan oleh negara untuk secara khusus diberikan kepada pihak tertentu. Dengan kata lain, siapa saja dapat memperoleh apa saja, sejauh ia mampu dan mau menaati aturan main yang berlaku.

Undang-undang No. 38 Tahun 2009 tersebut dapat dikatakan merupakan cerminan yang sangat persis dari semangat zaman liberal yang agresif, yang memaksa siapa saja untuk tunduk dan mengikuti aturan permainan yang berlaku di dalamnya. PT Pos Indonesia (persero) juga tunduk terhadap 'hukum sejarah' ini dan, lebih dari itu, sesungguhnya memang sudah mengantisipasinya dari jauh-jauh hari. Berbagai kebijakan dan taktik bisnis yang diambil PT Pos Indonesia (persero) dalam jangka dua dekade terakhir -atau sejak menjadi perseroan-sudah mencerminkan semangat usaha modern yang tidak lagi birokratis atau mengedepankan

(1) Lihat Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Pasal 4 menyebutkan badan usaha yang boleh melakukan "penyelenggaraan pos" adalah badan-badan usaha milik negara, daerah, swasta, serta koperasi. Badan-badan tersebut diizinkan untuk menggarap bidang-bidang yang selama ini dikerjakan oleh PT Pos, yakni layanan surat, paket, logistik, transaksi keuangan serta keagenan pos, seperti disebutkan di Pasal 5.

Daftar Pustaka

- Anwar, Rosihan. 1985. "19 Desember 1948; Aksi Militer Belanda Kedua dan Yogya Diduduki," dalam *Musim Berganti Sekilas Sejarah Indonesia, 1925-1950*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London dan New York: Verso.
- Basah, Achmad. 1947. "Laporan tentang Perdjalanana Wk. Ktp ke Djawa." Manuskrip ketikan tidak diterbitkan yang dibuat antara tanggal 13 April sampai 30 Juni 1947.
- 1948. "Disekitar Truce-Agreement dan Renville-Principles," Naskah ketikan tidak diterbitkan. Laporan dibuat pada April-Juli 1948 di Yogyakarta dan di Bukittinggi.
- 1949. "Pemandangan dan Rentjana Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon Republik Indonesia untuk Menghadapi RIS," Naskah stensilan tidak diterbitkan. Soeliki, 17 Nopember 1949.
- 1949. Catatan Harian Achmad Basah 25 Januari 1949 sampai 15 Oktober 1949 di Lubuksikaping. Manuskrip tulisan tangan tidak diterbitkan.
- Berdoeri, Tjamboek. 2004. *Indonesia dalem Api dan Bara*. Jakarta: ELKASA.
- Biro Pusat Statistik. 1995. *Statistik Indonesia 1995*. Jakarta: Biro Statistik Indonesia.
- 2008. *Statistik Indonesia 2008*. Jakarta: Biro Statistik Indonesia.
- Booth, Anne dan Peter McCawley. 1981. *The Indonesian Economy During The Soeharto Era*. Petaling Jaya, Selangor: Oxford University Press.
- Burger, D.H. Prajudi. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Djilid I. Jakarta: Pradnjaparamita.
- Campo, J. 1994. "Steam Navigation and State Formation", dalam Robert Cripp, (Ed.), *The Late Colonial State: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press.
- de Geus, P.B.R. 1984. *Masalah Irian Barat: Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer*. Leiden: Martinus Nijhoff.
- Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi – Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1985. *Tokoh-Tokoh Sejarah Perjuangan dan Pembangunan Pos dan Telekomunikasi di Indonesia*. Jakarta: Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi – Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. 1996. *50 Tahun Peranan Pos dan Telekomunikasi*. Jakarta: Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.
- Departemen Penerangan. 1967. *Pokok-pokok Kebidjaksanaan Kabinet Ampera dalam Tahap Konsolidasi*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.

- 1969. *Buku Repelita I*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- 1974. *Repelita II*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- 1979. *Repelita III*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- 1984. *Repelita IV*. Jakarta: Departemen Penerangan.
- 1989. *Repelita V*. Jakarta: Departemen Penerangan.

Departemen Perhubungan – Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. 1980. *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia: Jilid I, Masa Pra Republik*. Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

-----1980. *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia: Jilid I, Masa Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

-----1980. *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia: Jilid III Masa Demokrasi Liberal*. Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

-----1980. *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia: Jilid IV Masa Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

-----1980. *Sejarah Pos dan Telekomunikasi di Indonesia: Jilid V Masa Orde Baru*. Jakarta: Departemen Perhubungan-Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Djawatan PTT. 1951. *Laporan Tahunan 1950*. Bandung: Djawatan PTT.

-----1954. *Laporan Tahunan 1953*. Bandung: Djawatan PTT.

-----1956. *Laporan Tahunan 1955*. Bandung: Djawatan PTT.

-----1961. *Laporan Tahunan 1960*. Bandung: Djawatan PTT.

Djojohadikoesoemo, Soemitro. 1947. *Beberapa Soal Koeoangan*. Djakarta: TP.

Drucker, Peter F. 1954. *The Practice of Management*. New York: Harper and Row Publisher, Inc.

Elson, R.E. 2008. *The Idea of Indonesia: A History*. New York: Cambridge University Press.

Furnivall, J. S. 1944. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge and New York: At The University Press and the Macmillan Company.

Gallop, Annabel Teh and Bernard Arps. 1991. *Golden Letters: Writing Traditions of Indonesia*. London and Jakarta: The British Library and Yayasan Lontar.

Halim, Abdul. 1999. *Dasar-dasar Akuntansi Biaya*, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFE-Universitas Gajah Mada.

Hatta, Mohammad. 1961. "Colonialism and the Danger of War," dalam *Asian Survey* 1, 9 November 1961.

-----1991. "On the Road to Transfer of Sovereignty," dalam *Portrait of Patriot* sebagaimana dikutip oleh Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. Jakarta: Gramedia.

- Henk Schulte Nordholt, Bambang Purwanto, Ratna Saptari. editor. 2008. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta-Denpasar: Yayasan Obor Indonesia. KITLV-Jakarta. Pustaka Larasan.
- Henkin, David M. 2006. *The Postal Age: The Emergence of Modern Communications in Nineteenth-Century America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Husein, Ahmad. et.al. 1991. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minangkabau*. Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia.
- Juwono, Sudarmawan. 2004. *Selayang Pandang Arsitektur Kantor Pos Tempo Doeloe*. Depok: Komunitas Pos.
- Kahin, Audrey. 1998. *Perjuangan Kemerdekaan: Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Padang: MSI Sumatera Barat.
- 2005. *Dari Pemberontak ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: YOI.
- Kertajaya, Hermawan. dkk. 1999. *"Bridging To The Network Company: Transformasi Pos Indonesia Menuju Perusahaan Kelas Dunia."* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartodirdjo, Sartono. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium Sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia.
- Khoiriyah, Mu'inatul. 2007. *Surat Rindu Untuk Ayah di Pulau Buru*, Kebumen: Indipt-press.
- Kuntari, C.M. Rien. 2008. *Timor-Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.
- Lombart, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya: Batas-batas Pembaratan*. Jakarta: Gramedia.
- Makarim, Zacky Anwar. et al. 2003. *Hari-hari terakhir Timor-Timur: Sebuah Kesaksian*. Jakarta: Sportif Media Informasindo.
- Maladi, R. 1993. "Aset Komunikasi dalam Perjuangan Era PDRI." Makalah Seminar PDRI, Padang 1993.
- Moerdiono. 1997. "Sebuah Refleksi Ideologis tentang Revolusi Nasional Indonesia," dalam Taufik Abdullah (ed.), *Denyut Nadi Revolusi Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Munawir, Slamet. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Nas, Peter J.M. dan Pratiwo. 2002. "Java and De Groote Postweg, Le Grande Route, The High Military Road" (2002), dalam <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/1744/2505> (Diakses 20 Agustus 2009).

- Notosusanto, Nugroho. 1979. *The Peta Army during the Japanese Occupation of Indonesia*. Tokyo: Waseda University Press.
- Pane, Neta S. 2001. *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan, dan Impian*. Jakarta: Grasindo.
- Panglaykim, J. 2005. "Some Aspect of State Enterprises in Indonesia" dalam Hadi Susastro, et.al, (ed), *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Jilid 2. Jakarta: ISEI dan Kanisius.
- Perum Pos dan Giro. 1991. *Laporan Tahunan 1990*. Bandung: Perum Pos dan Giro.
 -----1993. *Laporan Tahunan 1992*. Bandung: Perum Pos dan Giro.
 -----1994. *Laporan Tahunan 1993*. Bandung: Perum Pos dan Giro. 427
 -----1994. *130 Tahun Prangko Indonesia*. Bandung: Perum Pos dan Giro.
 -----1994. *130 Tahun Prangko Indonesia*. Bandung: Perum Pos dan Giro.
 -----1984. "Himpunan Peraturan Tentang Pelaksanaan Dinas Pos di Indonesia Sejak Tahun 1876." Bandung: Direktorat Personalia dan Tata Usaha Perum Pos dan Giro.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poeze, Harry A. 2008. *Tan Malaka, Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia: Jilid 1: Agustus 1945-Maret 1946*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- PT Pos Indonesia. 1998. *Rencana Jangka Panjang 1999-2003*. Bandung: PT Pos Indonesia.
 -----1999. *Laporan Tahunan 1998*. Bandung: PT Pos Indonesia.
 -----2003. *Laporan Tahunan 2002*. Bandung : PT Pos Indonesia.
 -----2004. *Laporan Tahunan 2003* . Bandung: PT Pos Indonesia.
 -----2005. *Laporan Tahunan 2004*. Bandung: PT Pos Indonesia.
 -----2007. *Rencana Jangka Panjang PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2007-2011*. Bandung: PT Pos Indonesia.
 -----2008. *Laporan Tahunan 2007*. Bandung: PT Pos Indonesia.
- Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi.
- Saleh, Hasan. 1992. *Mengapa Aceh Bergolak: Bertarung untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung untuk Kepentingan Daerah*. Jakarta: Grafiti.
- Seda, Frans. 1968. "Rehabilitasi Politik Anggaran Belandja Negara" dalam Presidium KAMI Pusat, *Simposium Masalah Ekonomi dan Pemetjahannya*, 1-6 Djuni 1968. Jakarta: Senat Mahasiswa FEUI.
- Soebadio, Haryati dan Saporinah Sadli. 1990. *Kartini: Pribadi Mandiri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soeroto, Siti Soemandari. 1977. *Kartini: Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suryo, Djoko. 2005. "Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990," dalam Freek Colombijn, Martine Barwegen, Purnawan Basundoro, dan Johny Alfian (ed.), *Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Sutrisno, Sulastin. 1979. *Surat-Surat Kartini: Renungan Tentang dan Untuk Bangsaanya*. Jakarta: Djambatan.

Toer, Pramoedya Ananta. 2005. *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*. Jakarta: Lentera Dipantara.

-----1995. *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta: Lentera.

Utrecht, Elien. 2006. *Melintasi Dua Jaman: Kenangan tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Voskuil, Robert P.G.A. dkk. 2007. *Bandung, Citra Sebuah Kota (Bandoeng, Beeld van Een Stad)*. Bandung: ITB.

Wertheim, W. F. 1956. *Indonesian Society in Transition*. Bandung: Sumur Bandung.

Widoyoko, Yoyok dan Budut W Andibya. 2005. *Kepemimpinan BUMN dalam Arus Perubahan*. Jakarta: Gibon Publication.

Young, Arthur P. 2008. "Aftermath of a prediction: F.W. Lancaster and the paperless society," malakah.

Zed, Mestika. 1997. *Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Jakarta: Grafiti.

MEDIA MASSA

Bulletin Kantor Pusat PN Pos dan Giro, Tahun I No. 10-11-12, (Oktober-Desember 1967).
DetikNews, Rabu, 06/07/2005 12:06 WIB.

Kompas, 28 Januari 1999.

Majalah Tempo, Nomor 37/XVIII 12 November 1988.

Merpatipos, No. 2 Tahun 7, Februari 1973.

Merpatipos, No. 3 Tahun 7 Maret 1973.

Merpatipos, No. 7 Tahun 7 Juli 1973.

Merpatipos, No. 7 Tahun 7 Juli 1973.

Merpatipos, No. 11 Tahun 7 Nopember 1973.

Merpatipos, No. 9 Tahun 8 September 1974.

Merpatipos, No. 12 Tahun 8 Desember 1974.

Merpatipos, No. 10 Tahun XV Oktober 1981.

Merpatipos, No. 9 Tahun XVI September 1982.

Merpatipos, No. 7 Tahun XVII Juli 1983.

Merpatipos, No. 10 Tahun XVII Oktober 1983. 429

Merpatipos, No.1 Tahun XIX Januari 1985.

Merpatipos, No. 8 Tahun XIX Agustus 1985.

Merpatipos, No. 9 Tahun XIX September 1985.

Merpatipos, No. 3 Tahun XX Maret 1986.

Merpatipos, No. 9 Tahun XX September 1986.

Merpatipos, No. 10 Tahun XX Oktober 1986.

Merpatipos, No. 1 Tahun XXV Januari 1991.

Merpatipos, No. 3 Tahun XXV Maret 1991.
Merpatipos, No. 5 Tahun XXV Mei 1991.
Merpatipos, No. 9 Tahun XXV September 1991.
Merpatipos, No. 10 Tahun XXV Oktober 1991
Merpatipos, No. 12 Tahun XXV Desember 1991.
Merpatipos, No. 1 Tahun XXVI Januari 1992
Merpatipos, No. 1 Tahun XXVII Januari 1993.
Merpatipos, No. 11 Tahun XXVII November 1993.
Merpatipos, No. 01 Tahun XXIX Januari 1995.
Merpatipos No. 7 Tahun XXIX Juli 1995,
Merpatipos, No. 2 Tahun XXX Pebruari 1996
Merpatipos, No. 3 Tahun XX Maret 1996
Merpatipos, No. 5 Tahun XXX Mei 1996
Merpatipos, No. 6 Tahun XXX Juni 1996,
Merpatipos, No. 7 Tahun XXX Juli 1996
Merpatipos, No. 8 Tahun XXX Agustus 1996.
Merpatipos, No. 9 Tahun XXX September 1996.
Merpatipos, No. 1 tahun XXXI Januari 1997.
Merpatipos, No. 11 Tahun XXXI November 1997.
Merpatipos, No. 2 Tahun XXXIII Februari.
Merpatipos, No. 3 Tahun XXXIII Maret 1999.
Merpatipos, No. 4 Tahun XXXIII April 1999.
Merpatipos, No. 5 Tahun XXXIII Mei 1999.
Merpatipos, No. 6 Tahun XXXIII Juni 1999.
Merpatipos, No. 7 Tahun XXXIII Juli 1999
Merpatipos, Triwulan I, 2003.
Merpatipos, Mei 2004.
Merpatipos, Juni 2004.
Merpatipos, Juli 2004.
Merpatipos, Oktober 2004.
Merpatipos, Edisi 1 2006.
Merpatipos, Edisi 03 2006.
Merpatipos, Edisi 1 2007.
Soeara Asia, 14 Maret 1944.
Union Postale No. 9 Tahun 1970.
Warta Resmi Bulanan Nomor Istimewa, Tahun 2, 1968. 430

WAWANCARA

Ali Subu, Makassar, 15 April 2009.
Arief Setyanto, Kepala Wilayah Pos II, Padang 23 April, 2009.
Basirun, Bukittinggi, 30 Juli 2009.
Darmawan, Makassar, 15 April 2009.
Endang Muchtarom, Bandung, 7 Mei 2009.
Fauzi Arisman, Medan, 13 April 2009.
Ismail Isdito, mantan Kepala Bagian Filateli (1994–1996),
Bandung 14 Januari 2010

Irene Chen, Filatelis di Malang, Malang, 9 Agustus 2009.
Iwan Gunawan, Surabaya, 22 April 2009 dan 5 Agustus 2009.
Jimmy, pegawai PT Pos Indonesia, Jayapura, 4 April 2009.
Kasmir, Medan, 13 April 2009.
Kliwon Darmosuwito, Yogyakarta, 13 April 2009.
Marsoedi, Mantan Dirut Pos dan Giro, Bandung, 7 Mei 2009.
Marzuki Firmansyah, Padang, 20 April 2009.
Modi, Semarang, 23 April 2009.
Muadi, Surabaya pada tanggal 20 April 2009.
Nursakian, pensiunan pegawai PT Pos Indonesia, Semarang, 22 April 2009.
Ronald Siahaan, pegawai PT Pos Indonesia, Surabaya, 21 April 2009.
Sinta, Makassar, 15 April 2009.
Srijoto, mantan Sekretaris Perusahaan, Bandung, 14 Januari 2010.
Sri Hartati, Yogyakarta, 13 April 2009.
Sudarmawan Juwono, Jakarta, 1 Mei 2009.
Suwartono, Blitar, 1 Juni 2009 dan 2 Agustus 2009.
Syahrulla di Medan, 15 April 2009.
Tamrin, Medan, 13 April 2009.
Toekoel Hadiwirjanto, Yogyakarta 14 April 2009.
Tri Anubowo Santoso (Bowo), Purwodadi, 22 April 2009.
Tuwuh Widodo, Surabaya, 20 April 2009.
Ustad Syarif, Poso, 10 Februari 2010.
Widodo Dwi Tjahjono, mantan Direktur SDM (2000-2005),
Bandung, 14 Januari 2010
Yantewo, pegawai PT Pos Indonesia, Jayapura, 4 April 2009.
Yusak Prakarsa, Jayapura, 3 April 2009.